

Politik Perempuan Di Kota Makassar

(Studi Terhadap Peran Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar)



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik Pada
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

SRI SUMARNI SJAHRI

30600112012

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI SUMARNI SJAHRIL
Nim : 30600112012
Jurusan/Prodi : Ilmu Politik
Program Studi : S1
Fakultas : Ushuluddin, Filsafat,&Politik
Judul Skripsi : Politik Perempuan Di Kota Makassar (Studi Terhadap
Peran Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plangiasi dari karya/penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh dewan anggota penguji.

Samata, 22 April 2016

Yang Menyatakan:



SRI SUMARNI SJAHRIL
NIM: 30600112012

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Politik Perempuan Di Kota Makassar (Studi Terhadap Peran Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar)”. Yang disusun oleh SRI SUMARNI SJAHRIL, Nim: 30600112012, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada fakultas Ushuluddin.Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 April 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 22 April 2016

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.

Sekretaris : Syahrir Karim, M.Si, Ph.D.

Munaqisy I : Prof. Dr. Muh. Saleh Tajuddin, MA, Ph.D.

Munaqisy II : Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si.

Pembimbing I : Syahrir Karim, M.Si, Ph.D.

Pembimbing II : Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.Si

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik

UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA
NIP: 19590704 1989031 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain puja dan puji syukur yang tak henti-hentinya penulis bisa sampaikan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat iman dalam agama rahmatan lil alamin, juga yang telah memberikan kesehatan serta kesempatan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salam serta shalawat penulis haturkan kepada junjungan tertinggi, panutan serta tauladan abadi baginda Rasulullah SAW, yang berkat jasa serta bimbingannya lah sehingga umat manusia bisa berkembang dari zaman keterpurukan menuju masa cemerlang serta berkeadaban ini.

Adapun judul dari Skripsi yang telah penulis himpun berjudul **“Politik Perempuan Di Kota Makassar (Studi Terhadap Peran Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar)”** Sebagai seorang manusia yang pasti tidak luput dari kesalahan tentu dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit rintangan yang penulis hadapi, oleh karena itu penulis sangat membutuhkan berbagai kritikan serta saran yang dapat memotivasi serta memberikan referensi kepada penulis demi membuat skripsi ini jauh lebih baik lagi.

Sebagai penulis besar harapan saya agar skripsi yang telah saya susun bisa berguna bagi umat manusia khususnya untuk mahasiswa UIN ALAUDDIN MAKASSAR, sebagai bahan bacaan yang memberikan wawasan serta pengetahuan dan dijadikan bahan tambahan referensi dalam mata kuliah tertentu walaupun isi dari skripsi saya masihlah jauh dari kata sempurna.

Penulis menyadari Skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak **Syahrir Karim, M.Si, Ph.D** dan Ibu **Ismah Tita Ruslin.S.IP.,M.Si** selaku Pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan arahan serta nasehat kepada penulis selama kegiatan penulisan Skripsi ini berlangsung. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Muh. Natsir, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Ketua Sidang
3. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Alauddin Makassar dan selaku Penguji II
4. Bapak Prof. Dr.Muh. Saleh Tajuddin MA, Ph.D. selaku Penguji I
5. Secara khusus kupersembahkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Fendy Sjahril dan Ibunda Salma, terima kasih atas doa, limpahan kasih sayangmu selama ini, membesarkan, membimbing penulis hingga sampai saat ini, berkat doa-doanya sehingga penulis sampai sekarang bisa seperti ini. semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayangnya dan memberikan kesehatan serta keselamatan dunia akhirat bagi ayahanda dan ibunda tercinta.

6. Adik adik ku Sukmawati Sjahril dan Muhammad Fabio Arcadia terima kasih atas motivasi, doa dan semangat yang selalu diberikan kepada Penulis, semoga cita-citamu tercapai.
7. Dosen-Dosen Ilmu Politik beserta staf akademik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi ini
8. Terkhusus Teman seperjuanganku JJM (St.Nurhaedah, Syahrir Ali Ibrahim S.IP, Eko Rachmat Saputro, Irfan, Khaidir Alif, Muhammad Ibnu) yang selalu memberi dukungan dikala penulis galau dengan skripsinya
9. Teman-teman Komunitas Sobat Budaya Makassar yang selalu memberikan dukungan disaat penulis mengerjakan skripsi ini
10. Teman-teman Komunitas Makassar yang selalu memberikan saya petunjuk arah ketika saya meneliti
11. Teman-teman kelas ku Ilmu Politik 1 dan 2 angkatan 2012 yang mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini terkhusus juga buat Habiba S.IP, Fatmawati S.IP dan Jumriani, Nurfairah, Nurul Fadliyah yang selalu menjadi teman bertukar pendapat di kelas
12. Teman-teman PERBAKIN UINAM yang memberi dukungan banyak dalam pembuatan skripsi ini
13. Bapak dan Ibu dari Partai Nasdem Kota Makassar yang telah memberikan kemudahan dalam proses penelitian
14. Bapak dan ibu perpustakaan umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang selalu membantu dalam proses pencarian referensi

15. Teman-teman SMAku (Andi Nurul Chutami dan Annisa Ilahi Thaha) yang selalu membantu penulis ketika mencari solusi dari masalah penulisan skripsi ini
16. Semua Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu dan selalu memberi penulis dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai penulis yang masih pemula dan masih kurangnya pengalaman yang mendalam, masih terdapat banyak kekurangan yang terdapat didalam skripsi yang telah saya susun. sehingga, sebagai penulis besar harapan saya untuk memberikan ruang kepada pembaca untuk sumbangsi serta partisipasi yang membangun kepada penulis untuk menjadikan skripsi ini lebih baik dari sebelumnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Samata, 22 April 2016



SRI SUMARNI SJAHRIL
NIM: 30600112012

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Landasan teori	19
F. Metode Penelitian	25
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	27
A. Kota Makassar	27
1. Gambaran Umum Kota Makassar	28
2. Keadaan geografis	29
3. Penduduk	31
4. Keagamaan	33
B. Partai Nasdem	34
1. Gambaran Umum Partai Nasdem	34
2. Visi dan Misi Partai Nasdem	34
3. Tujuan dan Fungsi Partai Nasdem	35
4. Lambang dan Tanda Gambar Partai	36

5. Keanggotaan dan Pendidikan Politik serta Sistem Kaderisasi Partai.....	37
6. Sejarah Lahirnya Partai Nasdem di Provinsi Sulawesi Selatan.....	38
C. Partisipasi Politik Perempuan Di Kota Makassar.....	39
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Peran Politik Perempuan dalam Partai Nasdem Kota Makassar.....	46
A.1.Peran Pada Masyarakat.....	47
A.2.Peran Pada Institusi Partai	49
A.3.Peran Pada Lembaga Legislatif	51
B. Implikasi dari Peran Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar Bagi Penguatan Posisi Politik Perempuan	54
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kelurahan Menurut Dirinci Kecamatan di Kota Makassar.....	30
Tabel 2 Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin (2011-2013)..	31
Tabel 3 Daftar Calon Legislatif Perempuan Kota Makassar Tahun 2014 Berdasarkan Partainya	41
Tabel 4 Nama Anggota Legislatif Kota Makassar Periode 2014-2019 dan jabatannya	43



ABSTRAK

Nama : Sri Sumarni Sjahril
NIM : 30600112012
Judul : “Politik Perempuan Di Kota Makassar (Studi Terhadap Peran Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar)”

Skripsi ini mengkaji tentang peran politik perempuan Partai Nasdem Kota Makassar. Penelitian ini berawal dari jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya dibidang pemerintahan dan hukum. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran politik perempuan dalam Partai Nasdem Kota Makassar dan implikasi dari peran politik perempuan Partai Nasdem Kota Makassar bagi penguatan posisi politik perempuan. Teori yang digunakan yaitu teori feminisme, teori partisipasi politik dan representasi.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan masalah penelitian penulis.

Hasil dari penelitian menggambarkan perempuan nasdem Kota Makassar yang memiliki peran sangat penting dimasyarakat dalam hal memberikan pendidikan politik terhadap anak muda makassar, selain itu hadirnya perempuan di legislatif bukan hanya ajang untuk merebut kekuasaan, namun bagaimana kekuasaan ini dimaknai sebagai perjuangan untuk memberikan posisi tawar kepada masyarakat marjinal. Itu dibuktikan dengan dirancangnya sebuah peraturan daerah mengenai air susu eksklusif dan salah satu pengusungnya ialah kader perempuan Partai Nasdem Kota Makassar. Implikasi dari peran politik perempuan Partai Nasdem Kota Makassar bagi penguatan posisi politik perempuan dimana Partai Nasdem Kota Makassar perempuan diberikan hak yang sama dengan laki laki dalam berpolitik itu dibuktikan di Partai Nasdem Kota Makassar sendiri dipimpin oleh seorang perempuan yang juga terpilih menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel. Selain ketua DPD Partai Nasdem Kota Makassar seorang kader perempuan nasdem juga terpilih sebagai wakil ketua DPRD Kota Makassar, itu membuktikan bahwa Partai Nasdem Kota Makassar memberikan perempuan posisi-posisi strategis dalam politik bukan hanya di legislatif saja tetapi dalam kepengurusan partaiupun perempuan diberikan posisi yang strategis. Dan hasil dari keterwakilan perempuan khusus DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu ada sebuah PERDA yang sementara persiapan pengesahan di akhir Januari yaitu PERDA pengarusutamaan gender dan satu lagi dari DPRD Kota Makassar ada satu rancangan peraturan daerah mengenai air susu eksklusif yang sementara pembahasan dan salah satu kordinatornya ialah Indira Mulyasari Pramastuti.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan perempuan di Indonesia secara formal cukup kuat sebab banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peraturan lain yang memberi perlindungan yuridis padanya. Selain itu, Indonesia pun telah meratifikasi dua perjanjian, yaitu perjanjian mengenai hak politik perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*) dan perjanjian mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Political Elimination against Women* atau CEDAW).¹ Kemudian pada 1993, Indonesia telah menerima Deklarasi Wina yang sangat mendukung kedudukan. Akhirnya, dalam Undang-Undang Pemilihan Umum 2004 dibuka kesempatan agar perempuan dipertimbangkan menduduki 30% kursi wakil rakyat.

Konvensi Hak Politik Perempuan, yang pada 1952 diterima PBB dan telah diratifikasikan oleh DPR menjadi UU No 68 Tahun 1958, pada Pasal 1 menetapkan bahwa: 'Perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi (*Women shall be entitled to vote in all elections on equal terms with men without any discrimination*).'² Hak ini telah dilaksanakan dalam Pemilu 1955, sebelum Indonesia meratifikasi konvensi ini. Pasal 2 menyatakan: "Perempuan dapat

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.257.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 258.

dipilih untuk semua badan efektif yang diatur dengan hukum nasional, dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi (*Women shall be eligible for election to all publicly elected bodies established by national law, on equal terms with men, without any discrimination*); “Perempuan berhak menduduki jabatan resmi dan menyelenggarakan semua fungsi resmi yang diatur semua hukum nasional, dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi (*Women shall be entitled to hold public office and to exercise all public function, established by national law, on equal terms with men, without any discrimination*).”³

Sesungguhnya jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya dibidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945, tanggal 17 Agustus 1945, dalam pasal 27 ayat 1, yang lengkapnya berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁴

Pada pemilihan umum tahun 1955, pada masa Orde Lama, jumlah perempuan di DPR mencapai 17 orang, empat diantaranya dari organisasi Gerwani dan lima dari Muslimat NU. Pemilihan umum pertama dinilai sebagai demokratis, dengan partisipasi perempuan dalam politik didasarkan pada kemampuan mereka sebagai pemimpin dari unit-unit yang ada dalam organisasi-organisasi partai.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 258.

⁴ Imas Rosidawati, “Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Kesiapan Partai Politik & Perempuan Indonesia Di Arena Politik Praktis” h. 1.

Berbeda dengan periode Orde Lama (era Soekarno), pada masa Orde Baru (era Soeharto) dengan konsep partai mayoritas tunggal, representasi perempuan dalam lembaga legislatif dan dalam institusi-institusi kenegaraan, ditetapkan oleh para pemimpin partai ditingkat pusat, sejumlah tertentu elit. Akibatnya, sebagian perempuan yang menempati posisi penting memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan para pejabat dan pemegang kekuasaan ditingkat pusat. Hal ini dimungkinkan karena dalam sistem pemilu proporsional pemilih tidak memilih kandidat (orang), tetapi simbol partai, untuk berbagai tingkatan pemerintahan, yaitu tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Akibatnya, sebagian dari mereka tidak melewati tahapan dalam proses pencalonan/ pemilihan, dan mungkin tidak memiliki kemampuan mengartikulasikan kepentingan konstituennya.

Dalam pemilihan umum 1999, proses pemilihan mengalami perubahan cukup berarti, dimana rekrutmen kandidat partai untuk lembaga legislatif, termasuk perempuan, harus disetujui oleh daerah, para pengambil keputusan partai di daerah (hal ini tidak berlaku bagi wakil dari angkatan bersenjata dan polisi). Sebagian besar wakil perempuan yang terpilih berpartisipasi dalam proses pemilu, antara lain dalam upaya pembelaan terhadap masyarakat, diskusi, ceramah dan kegiatan partai lainnya yang berhubungan dengan kampanye pemilu.⁵

Pada Pemilu Tahun 2004, kuota 30% keterwakilan perempuan diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan

⁵ Khofifah Indar Parawansa “*Studi Kasus : Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan*” (CS-Indonesia, 2003) h. 43-44.

pada Pemilu Tahun 2009, kebijakan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kuota 30% keterwakilan perempuan antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol). Pasal 2 ayat (2) UU Parpol menyatakan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Selain itu, keterwakilan paling sedikit 30% untuk perempuan juga menjadi salah satu syarat dalam penyusunan kepengurusan parpol untuk tingkat pusat. Hal itu diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU Parpol. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kepengurusan parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga harus disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga parpol masing-masing (Pasal 20 UU Parpol).

Selain menjadi salah satu syarat dalam pendirian dan pembentukan parpol, kuota 30% keterwakilan perempuan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh parpol, baik untuk menjadi anggota parpol, bakal calon Anggota DPR dan DPRD, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maupun bakal calon presiden dan wakil presiden (Pasal 29 ayat (1a)).

Secara khusus, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu) sebagai salah satu dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2014 juga telah mencantumkan beberapa pasal

yang mengatur mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan. Ketentuan yang mengatur mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan tersebut terkait dengan beberapa substansi, yaitu:

1. Persyaratan parpol yang dapat menjadi peserta pemilu, diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dan Pasal 15 huruf d;
2. Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, diatur dalam Pasal 55, Pasal 56 ayat (2), Pasal 58, Pasal 59 ayat (2), Pasal 62 ayat (6), dan Pasal 67 ayat (2);
3. Penetapan calon terpilih, diatur dalam Pasal 215 huruf b.

Sebagai tindak lanjut kebijakan afirmasi tersebut, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (selanjutnya disebut Peraturan KPU). Pasal 27 ayat (1) Huruf b Peraturan KPU menyatakan jika ketentuan 30% keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada daerah pemilihan bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa parpol peserta pemilu akan mematuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan sehingga angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif diharapkan akan meningkat dibanding dengan hasil pemilu sebelumnya.⁶

⁶ Sali Susiana “*Penurunan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2014*”. http://berkas.dpr.go.id/pengkajianfiles/info_singkat/Info%20Singkat-VI-10-II-P3DI-April-2014-11.pdf . di akses pada 30 Juni 2015

Perempuan berhak menduduki jabatan politik meskipun ada sebagian yang tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin negara. Pendapat ini berdasarkan firman Allah swt dalam QS. At-Taubah/9:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya : :

71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁷

Ayat ini menjelaskan secara spesifik dengan mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan dapat melakukan salah satu bentuk aktivitas politik, karena laki-laki dan perempuan itu juga merupakan bagian dari masyarakat dimana perempuan dan laki-laki mempunyai kewajiban untuk berpolitik. Tidak bisa dipungkiri dan bahkan harus dipahami bahwa keduanya menjadi bagian masyarakat yang memiliki tanggung jawab yang sama untuk ikut menentukan arah, pola generasi kita dan masa depan. Oleh karena itu boleh dikatakan sangat

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya QS. At-Taubah/9:71* Semarang : Toha Putra. 2005

picik jika orang berpandangan bahwa dunia perempuan dibentengi oleh tirai domestik.

Selain ayat di atas, masih ada ayat lain yang menjunjung tinggi persamaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat/49:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

Terjemahnya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului (atau berlawanan dengan ketetapan) Allah dan Rasul-Nya(, dalam menetapkan suatu hukum tertentu), dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui." – (QS.49:1)⁸

Secara realitas politik kaum perempuan masih sangat kurang. Kendala utama disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Budaya patriarkhi dikalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan, bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat, terlebih di pedesaan. Label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang lemah, tidak bermanfaat dan terbelenggu ketergantungan telah didoktrin secara turun temurun. Perempuan dipersepsikan sebagai orang kelas dua yang seharusnya di rumah dan *dinabobokkan* dengan konsumerisme, hidonisme dalam cengkeraman kapitalisme. Perempuan lemah tidak sepatutnya bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan kekasaran permainan

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya QS. Al-Hujurat/49:1*. Semarang : Toha Putra. 2005

kekuasaan. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan karena *patron* membentuk perempuan sangat tendensius mengutamakan perasaan sehingga jauh dari sikap rasionalitas.⁹

Persepsi negatif tersebut dilekatkan pada perempuan sendiri telah terstruktur sedemikian rupa dibenak kaum perempuan dan kaum laki-laki.¹⁰ Pembongkaran budaya patriarkhal men-*jugment* perempuan membuat mitos sangat luar biasa kuat. Pemberdayaan perempuan terbentur dinding sangat kokoh dari interpretasi perempuan terhadap tinjauan politik, agama, sosial. Perempuan sebenarnya mempunyai otonomi mutlak tentang dirinya. Sebagai manusia mempunyai kedudukan setara membawa kepemimpinan di muka bumi. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dalam mengatur kesejahteraan manusia.¹¹ Telah terjadi kesenjangan antara gagasan keadilan yang mendudukan perempuan dengan laki-laki setara, namun realitas terjadi perempuan masih terkungkung oleh tidak adanya ruang kesempatan memadai mengaktualisasikan perannya.

Teriakan untuk menggagas peran perempuan dalam pembangunan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Perlu dilakukan secara bertahap dan terus menerus mengoreksi peran bersama yang telah diusung oleh manusia dalam konteks persamaan derajat dan pemberian ruang bebas bagi aktualisasi manusia. Perempuan sebagai manusia mempunyai tugas kemanusiaan tentu

⁹ Elvy Pasaribu, *Indonesia Masa Depan Dari Perspektif Perempuan*, (Salatiga : Yayasan Bina Darma, 2000) h. xii

¹⁰ Fatimah Mernisi, *Perempuan di antara logika dan kekuasaan*, (Jakarta: Qanita, 2003) h. 7

¹¹ Kurniawati Hastuti, *Belajar dari Kemenangan Perempuan Australia* (Jakarta : Kompas, 2004) h. 36

secara wacana mereduksi jumlah pembatasan, namun permintaan kouta 30% sebenarnya merupakan langkah maju secara berani menaikkan posisi tawar lebih realistis dari manipulasi patriarkhi. Dari realitas itulah, gagasan menambah kouta perempuan dari 12% hasil pemilu 1997 bertambah menjadi 30% pada 2004. Sebuah perbandingan cukup realistis untuk disetujui anggota parlemen menetapkan undang-undang.

Dalam Islam, politik (*al siyash*) dirumuskan sebagai cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jadi politik adalah ruang maha luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam ruang domestik maupun publik, kultural maupun struktural, personal dan komunal, tetapi penyebutan politik dalam pikiran banyak orang telah menyempit menjadi istilah politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang panjang¹².

Dalam Islam Kaum perempuan juga boleh berbai'at kepada Rasulullah saw sebagaimana halnya laki-laki. Allah swt memerintahkan untuk menerima bai'at dari padanya seperti dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah/60:12

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

¹² Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, terj. Ihksan Ali Fauzi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) h. 15

Terjemahnya :

“Hai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setiamereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹³

Secara umum disimpulkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam politik adalah suatu kewajaran, karena prinsip demokrasi memberikan hak kepada setiap orang untuk berpolitik dan menjaga serta membelakepribadiannya. Perempuan merupakan bagian dari umat yang mempunyai hak untuk memikul tugas-tugas politik sama dengan laki-laki dengan syarat berpegang pada syariat Islam.

Namun harus dipahami pula keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik atau terjun ke dalam aktivitas politik bukanlah agar mereka menguasai suatu posisi tertentu dalam masyarakat atau suara mereka didengar oleh umat masyarakat akan tetapi harus dipahami bahwa esensi kiprah politik perempuan adalah sebagai bagian dari kewajiban yang datang dari Allah SWT. Dan juga sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap masyarakat¹⁴

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Mumtahanah/60:12. (Semarang : Toha Putra. 2005)

¹⁴ Najmah Saidah, Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan Bercermin Pada Sahabiyat* (Cet.I, Bogor:CV.Idea Utama 2003) h. 149-150

Penelitian ini akan mengkaji tentang peran politik perempuan dengan memfokuskan pada peran perempuan di Partai Politik dengan mengambil objek Partai Nasdem, dimana kita ketahui Partai Nasdem Kota Makassar di ketuai oleh seorang perempuan yaitu Andi Rachmatika Dewi Y. yang terpilih sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014-2019 dan pencapaian Rachmatika juga diikuti oleh koleganya di Nasdem Makassar yakni Indira Mulyasari Pramastuti terpilih sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dari sinilah penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Politik Perempuan Di Kota Makassar (Studi Terhadap Peran Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Politik Perempuan dalam Partai Nasdem Kota Makassar?
2. Apa Implikasi dari Peran Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar bagi Penguatan Posisi Politik Perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Pada dasarnya penulisan ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran politik perempuan dalam Partai Nasdem Kota Makassar di parlemen, institusi partai dan masyarakat itu sendiri.

2. Untuk mengetahui implikasi dari peran politik perempuan Partai Nasdem Kota Makassar bagi penguatan posisi politik perempuan dengan itu kita bisa melihat hasil yang dilakukan oleh keterwakilan politik perempuan.

Sedangkan kegunaan penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut;

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yakni sangat diharapkan mendapatkan sebuah hasil yang berguna bagi seluruh kalangan dimanapun dan menjadi sebuah alat informasi yang mempermudah untuk mendapatkan sebuah pengetahuan tentang peran politik perempuan Partai Nasdem di Kota Makassar.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan agar berguna sebagai alat :

Untuk menguraikan serta menjadi pokok penyelesaian dari sebuah permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan mengenai peran politik perempuan Partai Nasdem di Kota Makassar. Sehingga dapat berguna untuk memberikan sebuah agent informasi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian berikutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Penelusuran pustaka yang dilakukan dengan melihat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah representasi politik perempuan antara lain:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Lia Natalia dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin tentang "Perempuan Dalam Gerakan Politik : Studi Kasus PK. Sejahtera Di Makassar" Menjelaskan

mengenai keikutsertaan perempuan Kota Makassar dalam politik. Khususnya peran perempuan dalam gerakan politik yang ada didalam PK Sejahtera. Dalam UU Pemilu yang memberi ruang kepada perempuan untuk kuota 30% masih perlu dikontrol oleh institusi perempuan seperti LSM, dan aktivis perempuan. Di Islam tidak pernah membatasi perempuan untuk berpolitik namun karena faktor budaya dan kemampuan dan kompetensi terkadang menghambat perempuan dalam berpolitik. Keikutsertaan Perempuan dalam politik masih belum maksimal karena disebabkan oleh konstruksi agama, budaya dan sosial masyarakat masih cenderung membatasi kebebasan perempuan. Artinya, perempuan yang ingin masuk kedalam partai politik sering harus berbenturan dengan kenyataan bahwa keterlibatannya berbenturan dengan budaya dan publik. Dalam kondisi Sulawesi Selatan, Khususnya Makassar masih sangat didominasi oleh budaya patriarki sehingga dominasi oleh budaya patriarki sehingga dominasi kaum laki-laki masih terjadi di semua segmen kehidupan dan termasuk juga di dalamnya persoalan politik. Dominasi patriarki inilah yang melahirkan apa yang sering disebut sebagai ketimpangan, ketidakadilan atau disparitas gender. Budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada dibawah laki-laki (subordinat) rawan. Sedangkan penelitian penulis ingin mengetahui bagaimana Peran Politik Perempuan Partai Nasdem di Kota Makassar¹⁵

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Dewi Pratama dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin tentang "Hak-hak Politik

¹⁵ Lia Natalia *"Perempuan Dalam Gerakan Politik: Studi Kasus PK. Sejahtera Di Makassar"* Skripsi (Makassar : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin)

Perempuan Dalam Islam : Analisis Kebijakan pada Lembaga Legislatif Di Indonesia" dimana penulis Menjelaskan dengan kedatangan islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* membawa kaum perempuan mejadi kaum yang mendapat prioritas baik dalam lingkup rumah tangga, masyarakat, maupun dari sisi kemanusiaan tidak memiliki tempat terhormat dihadapan laki-laki karena tidak adanya pengakuan atau sikap laki-laki terhadap peran perempuan pada masa pra-islam. Secara historis banyak bukti sejarah yang menunjukkan bahwa pada masa awal islam perempuan diberi kesempatan secara proposional terlibat dalam aspek yang dimaksud. Keterlibatan mereka dalam bidang itu dapat dilihat misalnya keikutsertaan mereka dalam melakukan bai'at terhadap pemimpin (khalifah) yang terpilih, keterlibatannya dalam medan perang dan lain-lain. Demikian pula Indonesia sebagai suatu Negara mempunyai bukti sejarah bahwa pada masa-masa sebelumnya beberapa perempuan Indonesia membuktikan kemampuannya dalam memimpin kerajaan, perang, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian ini banyak menjelaskan bagaimana hak-hak politik perempuan yang Dimana sangat mendukung dalam penulisan penelitian penulis yang ingin mengetahui bagaimana Peran Politik Perempuan Partai Nasdem di Kota Makassar¹⁶

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Khaerunnisa dari Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang "Perempuan dan

¹⁶ Kusuma Dewi Pratama "*Hak-hak Politik Perempuan Dalam Islam: Analisis Kebijakan pada Lembaga Legislatif Di Indonesia*" Skripsi (Makassar : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin)

Politik (Studi Perbandingan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Partai Golkar Dan Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar)" dimana penulis Menjelaskan mengenai minimnya keterwakilan perempuan di lembaga Politik formal salah satunya partai politik dalam tingkat lokal Kota Makassar dari 24 partai politik peserta pemilu 2004 tidak satupun partai politik dalam struktur kepengurusan yang diketuai oleh perempuan, posisi perempuan tertinggi dalam partai politik adalah sebagai sekretaris umum sedangkan dari 38 partai politik peserta pemilu 2009 sedikit adanya peningkatan meskipun tidak begitu signifikan dari 38 partai politik untuk Kota Makassar hanya dua partai yang berhasil diketuai oleh perempuan. Selain minimnya representasi perempuan dalam kepengurusan partai politik di Kota Makassar, satu persoalan lagi yang meminggirkan perempuan dalam proses politik yakni rekrutmen calon legislatif perempuan pada pemilu 2004, pada dasarnya partai politik peserta pemilu 2004 lalu di Kota Makassar telah melaksanakan amanah dari undang-undang pemilu no 12 tahun 2003 pasal 65 tentang kuota 30% dalam hal pencalegan. Sebagian besar partai politik telah mencapai angka tersebut bahkan ada beberapa partai politik yang mencalonkan perempuan lebih dari 30%. Hal itulah yang penulis menganggap bahwa partai politik belum sungguh-sungguh dalam memikirkan pentingnya keterwakilan perempuan. Penelitian ini akan berguna untuk peneliti dalam hal membandingkan hasil penelitian ketika turun ke lapangan.¹⁷

¹⁷ Khaerunnisa "Perempuan dan Politik (Studi Perbandingan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Partai Golkar Dan Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar)" Skripsi (Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

4) Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Ramdani dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Alauddin tentang "Perempuan, Politik dan Parlemen Di Kota Makassar (Studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2014)" dimana penulis Menjelaskan mengenai meningkatnya keterwakilan perempuan, maka ekspektasi masyarakatpun kian tinggi. Harapan agar dibawah kepemimpinan perempuan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.

- a. Distribusi kaum perempuan dalam Partai Politik sangat mempengaruhi komunikasi khususnya kaum perempuan dalam masyarakat Kota Makassar. Meski peran laki-laki paling dominan di antaranya. Namun perempuan banyak memberi manfaat kepada masyarakat seperti pemberian perempuan, ekonomi kinerja dan lain sebagainya.
- b. Peran perempuan dalam setiap dapil banyak melakukan kegiatan-kegiatan di antaranya mengajarkan masyarakat khususnya kaum perempuan tentang pendidikan politik, karena sebagian perempuan tidak mengerti tentang politik yang ada dalam budaya politik Kota Makassar.
- c. Keterwakilan Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar belum terlihat, dikarenakan bahwa kinerja perempuan baru berjangka beberapa bulan, jelas tidak terlihat. Tetapi keterwakilan perempuan dalam parlemen sangat berpengaruh seperti memberikan masukan ketika berada dalam rapat. Buktinya ada perempuan yang menjadi wakil ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.

d. Penghambat keterwakilan perempuan di parlemen itu karena pemenuhan kouta 30% belum terlaksana dengan baik karena pemenuhan kouta 30% belum terpenuhi mulai dari dapil hingga ke partai. Hal ini disebabkan karena 2 faktor yaitu faktor eksternal dan internal.¹⁸

5) Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Aini Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah 2009 tentang "Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Rembang Tahun 2004-2009" dimana penulis Menjelaskan mengenai penyebab Minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang, ini bisa dilihat dari jumlah anggota legislatif di Kabupaten Rembang yang hanya empat orang dari 45 kursi yang disediakan atau 8.8% dari yang seharusnya 30% sesuai UU. Pemilu. Keempat anggota legislatif perempuan tersebut adalah Nur Hayati dari Partai Golkar, Sayidah Fatimah dari PPP, Durrotun Nafisah dari PKB dan Endang Susanti dari PDIP. Sebab utama dari minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang, menurut Sayidah Fatimah, dikarenakan apatisisme perempuan dalam politik. Hal ini bisa dilihat dari minimnya perempuan yang mampu menempati posisi stakeholders politik di Rembang, sedangkan menurut Endang Susanti salah satu faktor penyebab minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif adalah faktor sumber daya manusia yang memang sangat minim. Minimnya partisipasi perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten

¹⁸ Ririn Ramdani " *Perempuan, Politik dan Parlemen Di Kota Makassar (Studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2014)*" Skripsi (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Alauddin)

Rembang diperparah dengan posisi mereka yang tidak mendapat porsi maksimal bahkan terkesan hanya sekedar sebagai pelengkap saja. Kesan ini dapat dirujuk bahwa keempat perwakilan perempuan di lembaga legislatif adalah dari partai besar yang berbeda sehingga dapat dimaknai keterwakilan mereka hanya untuk daya tarik mobilisasi masa perempuan demi kemenangan partai. Dapat dipahami bahwa secara realitas politik kaum perempuan masih sangat kurang. Kendala utama disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Budaya patriarki di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan, bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat, terlebih di pedesaan. Label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang lemah, tidak bermanfaat dan terbelenggu ketergantungan telah di doktrin secara turun temurun. Perempuan dipersepsikan sebagai orang kelas dua yang seharusnya di rumah dan dinabobokkan dengan konsumerisme, hedonisme dalam cengkeraman kapitalisme. Perempuan lemah tidak sepatutnya bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan kekasaran permainan kekuasaan. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan karena patron membentuk perempuan sangat tendensius mengutamakan perasaan sehingga jauh dari sikap rasionalitas. Sedangkan penulis ingin meneliti bagaimana implikasi dari peran politik perempuan terhadap penguatan posisi politik perempuan.¹⁹

¹⁹ Siti Nur Aini " Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif

E. Landasan Teori

a) Feminisme

Feminisme adalah suatu kesadaran akan adanya penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat, serta adanya tindakan secara sadar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik perempuan atau laki-laki, untuk mengubah keadaan tersebut²⁰

Teori feminis menyoroti isu yang diabaikan oleh sebagian besar teoritis laki-laki. Prestasi utama teori feminis adalah menempatkan politik seksualitas sebagai isu sentral dalam pemahaman tentang penindasan. Argumen yang dibangun oleh teori feminis adalah bahwa patriarki, atau supremasi laki-laki, muncul dari pembagian kerja berdasarkan seks, yang ada di wilayah privat maupun publik. Teori Feminis bukan hanya mengeksplorasi seksualitas dan domestifikasi, namun juga mengaitkan politik gender di kehidupan domestik dengan politik gender di dunia kerja upahan dan kehidupan publik. Jadi, feminisme terutama memberikan perhatian pada seks dan prinsip penataan kehidupan sosial yang sepenuhnya dipengaruhi oleh relasi kekuasaan. Feminism berpendapat bahwa subordinasi atas perempuan terjadi di semua institusi dan praktik sosial, jadi dia bersifat struktural. Subordinasi struktural yang menimpa perempuan lain disebut feminis dengan patriarki, dengan makna turunannya berupa keluarga yang di kepala laki-laki, penguasaan dan superioritas.

Feminisme Liberal

Kabupaten Remang Tahun 2004-2009" Skripsi (Semarang : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah 2009)

²⁰ Sitimudha mulia" *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia*" (Cet I: Yogyakarta: Kibar Press, 2008). h. xii

Feminis liberal melihat perbedaan laki-laki dengan perempuan sebagai kosntruk sosio-ekonomis dan budaya ketimbang sebagai hasil dari suatu biologi abadi. Mereka menekankan perlunya kesetaraan kesempatan bagi perempuan di semua bidang, yang, di dalam demokrasi liberal Barat, diyakini dapat tercapai di dalam struktur besar dalam kerangka kerja ekonomi dan hukum. Feminisme liberal memfokuskan diri pada hak-hak perempuan di ruang publik dan tidak menganalisis kekuatan hubungan yang mungkin ada di dalam rumah atau ruang privat; ini membuktikan bahwa keadilan karenanya akan menjamin kesuksesannya dan bahwa tidak akan punya alasan untuk melawannya.

b) Partisipasi Politik

Dalam menganalisa suatu sistem politik, maka soal partisipasi politik menjadi salah satu indicatok yang dapat mengukur kemajuan dari proses yang berlangsung di negara tertentu. Menurut Samuel Huntington meluasnya partisipasi politik di sebuah negara merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Masyarakat modern akan selalu berfikir dan aktif bergerak bagaimana ia dan juga kelompoknya dapat memberikan pengaruh dan tekanan kepada pemerintah dalam setiap kebijakan yang akan diputuskannya. Proses memberikan pengaruh inilah yang kemudian disebut sebagai bentuk partisipasi politik.

Samuel Huntington dan Joan M.Nelson dalam buku No Easy Choice : Political Participation in Developing Countries, Huntington dan Nelson membuat batasan partisipasi politik sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi biasa bersifat

individu atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif²¹

Sedangkan Herbert Mc Closky yang dikutip Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum²²

Dari beberapa pendapat-pendapat di atas ada beberapa kata kunci dalam memahami partisipasi politik, dimana partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan nyata (ikut pemilu, lobi, kegiatan organisasi, mencari koneksi, tindak kekerasan) bersifat sukarela, dilakukan oleh warga negara baik secara individu atau kelompok, memiliki tujuan-tujuan, berupaya memengaruhi atau mengubah kebijakan, dan mempunyai tingkatan-tingkatan partisipasi.²³

Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) telah menjamin keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif. Karena telah memberikan perlakuan khusus (*affirmative action*), kepada perempuan dan sejalan dengan konstitusi. menyebutkan partai politik wajib mengajukan minimal 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif. Undang-undang tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif

²¹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Padang:Kencana, 2011) h. 180

²² Miriam Budiardjo “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*” (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2007) h.367

²³ Gatara dan Said “*Sosiologi Politik:Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian Bandung* (Bandung: Pustaka setia,2007) h. 89-90

Namun kenyataannya jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi legislatif masih belum mencapai kuota yang dicalonkan yakni sebesar 30%.²⁴ Ketentuan tentang kuota bagi perempuan dalam pencalonan legislatif sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena memang undang-undang ini menghendaki agar dilakukan afirmatif dalam memperjuangkan hak politik perempuan.

c) Teori Representasi

Hanna Fenichel Pitkin (1969) mengemukakan bahwa *“the representative system is the modern form of democracy”* yang artinya adalah representasi layak dalam politik modern. Ada empat gagasan pokok cara Hanna Pitkin memandang representasi politik dikemukakan sebagai berikut

1. Representatif Otoritatif

Representatif otoritas adalah bahwa representatif merupakan pemberian wewenang oleh wakil sebagai individu, dalam hal ini, bahwa wakil diberi kewenangan untuk bertindak sendiri, yang sebelumnya tidak mempunyai wewenang dalam bertindak. Sebaliknya, keterwakilan yang memberikan beberapa haknya, harus bertanggung jawab dengan segala yang dilakukan oleh wakil. Karena keduanya ini saling berhubungan yang disebut sebagai “fimalistik”. Jadi teori formalistik berpusat pada otoritas yang artinya keduanya mempunyai perbedaan hanya dalam bentuk formal saja. Dengan demikian, kehadiran

²⁴ Tri Lisiani Prihatinah, *Hukum dan Kajian Jender* (Semarang, : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), h. 8.

perempuan dalam kekuasaan sangatlah penting demi memerankan peranan mereka dalam membentuk identitas politik perempuan

2. Representasi Deskriptif

Representasi deskriptif, dimana seseorang dapat berfikir tentang representasi sebagai *standing for* dalam segala sesuatu yang tidak ada. *Person* bisa berdiri demi orang lain. Model ini dipahami sebagai kesamaan deskripsi antara wakil dan diwakili. Ciri pandangan ini kebanyakan dikembangkan di antara yang membela representasi proposional, bahkan pandangan ini dianggap prinsip fundamental

3. Representasi Simbolik

Representasi simbolik berarti merepresentasikan sesuatu yang bukan merepresentasikan fakta. Ide *person* dapat direpresentasikan tidak dengan peta atau potret, tetapi dengan simbol, dengan disimbolkan atau diwakili secara simbolik. Meskipun sebuah simbol merepresentasikan “*standing for*” segala sesuatu, tetapi tidak menyerupai apa yang diwakili. Simbol memiliki ciri yang membantu meransionalisasi signifikansi simboliknya, sehingga simbol mensubsitusi yang diwakili dan simbol mensubstitusi apa yang disimbolkan

4. Representatif “*standing for*”

Pada sisi lain konsepsi merepresentasi sebagai “*standing for*” membawa pada pengertian lain representasi yaitu representasi sebagai pembuatan atau “penciptaan” jenis aktivitas. Kalau representasi sebagai aktivitas maka representasi dimaknai sebagai “*acting for*” orang lain. Representasi “*acting for*” berbeda dengan pandangan yang *formalistic*, sebab representasi ini lebih

memusatkan pada hakekat aktivitas sendiri menjangkau representasi substantif. Dalam konteks ini wakil berbicara, bertindak demi opini, keinginan, kebutuhan atau kepentingan substantif terwakil atau sering disebut dengan representasi ornat lain.

Dengan demikian dapat direfleksikan bagaimana tuntutan proporsionalitas perempuan dalam lembaga perwakilan. Artinya, bahwa politik *presence* menjadi sebuah tuntutan untuk mencapai proporsionalitas. Ada beberapa proporsionalitas dalam keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi antara lain :

Pertama, Representasi Formalistik bagi perempuan tuntutannya adalah proporsionalitas umumnya didasari oleh argumentasi bahwa kebanyakan sistem politik, perempuan menempati porsi kecil dalam jabatan-jabatan politik dan secara umum perempuan relatif sedikit memiliki posisi kekuasaan dan pengaruh dalam kehidupan publik dan privat. Perempuan sebagai anggota kelompok sosial struktural kurang ter-representasi dan ketidaksamaan struktural sosial tersebut sering menghasilkan ketidaksamaan politik dan eksklusi relatif bagi perempuan dari diskusi politik yang berpengaruh.

Kedua, Representasi Substantif adalah representasi bukan sekedar *more and less* tetapi bagaimana kepentingan substantif perempuan terrepresentasi secara baik. Mekanisme metafisis kehadiran perempuan yang lebih menggambarkan situasi-situasi pembuatan keputusan diperlukan guna membangun kembali kerangka perjuangan representasi perempuan. Dengan demikian untuk melahirkan representasi perempuan yang substantif, advokasi kebijakan dengan membawa isu-isu gender ke dalam kebijakan publik adalah menjadi elemen dasar.

Ketiga, Representasi Substantif Kerangka Advokasi Kebijakan adalah pemahaman dunia politik perempuan dan laki-laki yang direalisasikan dengan perempuan. oleh sebab itu, bila berorientasi pada berbagai pengalaman yang berharga dari perempuan yang selama ini mengalami ketidakadilan dan menempatkan kepentingan perempuan dan kapasitasnya untuk membawa perubahan sosial politik²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana representasi politik perempuan Partai Nasdem Kota Makassar dengan mendasarkan pada hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah Partai Nasdem Kota Makassar Jl Faisal Raya No.15

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- 1) Metode Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.

²⁵ Arbi Sanit. *Perwakilan Politik di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1985. Jakarta), h. 25

- 2) Metode Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.
- 3) Metode Dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Alat ini untuk pengumpulan data melalui Camera dan Handpone. Berguna mengumpulkan data bagi penulis di lapangan.
- 4) Metode Online adalah metode yang digunakan penulis melalui media online seperti internet, sehingga internet merupakan salah satu medium atau ranah yang sangat bermanfaat bagi penelusurari berbagai informasi, mulai dari informasi teoritis maupun data primer ataupun skunder yang diinginkan penulis untuk kebutuhan penulisan. Metode ini akan melengkapi isi skripsi atau membandingkan permasalahan di lapangan dengan metode online.²⁶

4. Metode Analisa Data

- 1) Data Primer yaitu data empirik yang diperoleh dari informan penulisan dan hasil observasi.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan.

Kedua data tersebut, akan dianalisis secara kualitatif, kemudian diinterpretasi dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan misalnya untuk

²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2009),. h 124.

memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap mengenai peran politik perempuan Partai Nasdem di Kota Makassar.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Makassar

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. Selanjutnya Kota Makassar menjadi Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten tetangga yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangan selanjutnya nama Kota Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota

Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk.II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis. Hingga saat ini Kota Makassar memasuki usia 406 tahun sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar yaitu tanggal 9 Nopember 1597.²⁷

2. Keadaan Geografis

Kota Makassar secara administratif sebagai ibukota propinsi Sulawesi Selatan berada pada bagian barat pulau Sulawesi dengan ketinggian, 0-25 m dari permukaan laut. Kota Makassar secara geografis terletak:

5⁰8, 6, 19 " Lintang Selatan (LS)

119⁰ 24' 17' 38" Bujur Timur (BT)

Batas administrasi wilayah Kota Makassar berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Gowa
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Secara administratif luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km² yang meliputi 14 kecamatan dan terbagi dalam 143 kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT dimana Kecamatan Biringkanaya mempunyai luas wilayah yang sangat besar 48,22 km atau luas kecamatan tersebut merupakan 27,43 persen dari seluruh luas Kota Makassar dan yang paling kecil adalah Kecamatan Mariso 1,82 km atau 1,04 persen dari luas wilayah Kota Makassar.

²⁷ Dikutip dari <http://www.makassarkota.go.id> di akses pada 1 November 2015 Pukul 20:00 Wita

Berikut dapat kita lihat pada tabel 1 tentang jumlah kelurahan menurut kecamatan dan kecamatan di Kota Makassar:

Tabel 1
Jumlah Kelurahan Menurut Dirinci Kecamatan di Kota Makassar

No.	Kode wil.	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	010	Mariso	9	47	246
2	020	Mamajang	13	56	238
3	030	Tamalate	10	69	369
4	031	Rappocini	10	37	139
5	040	Makassar	14	45	169
6	050	Ujung Pandang	10	57	257
7	060	Wajo	8	77	464
8	070	Bontoala	12	50	199
9	080	Ujung Tanah	12	90	473
10	090	Tallo	15	108	532
11	100	Panakuk kang	11	105	505
12	101	Manggala	6	66	366
13	110	Biringkanaya	7	106	566
14	111	Tamalanrea	6	67	330
Jumlah			143	980	4.867

Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2012.

Dari data di atas kita bisa melihat Jumlah Kelurahan Menurut Dirinci Kecamatan di Kota Makassar yang terbanyak kelurahannya ialah kelurahan Tallo yang berjumlah 15 kelurahan yang terdiri dari 108 RW dan 532 RT. Sedangkan jumlah Kelurahan yang sedikit ada di kelurahan Tamanlarea yaitu 6 kelurahan 67 RW dan 330 RT.

3. Penduduk

Makassar merupakan kota yang multi etnis Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku Makassar dan Suku Bugis sisanya berasal dari suku Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya adapun jumlah penduduk di Kota Makassar.²⁸

Berikut dapat kita lihat pada tabel 2 tentang Jumlah Penduduk di Kota Makassar 2011-2013 dan Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin (2011-2013)

Tabel 2
Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin (2011-2013)

Kecamatan	2011		2012		2013	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
010 Mariso	27.836	28.039	28.165	28.359	28.333	28.245
020 Mamajang	28.811	30.187	28.892	30.278	28.405	29.682
030 Tamalate	84.474	86.404	87.551	89.396	90.595	92.344

²⁸ Dikutip dari <http://www.makassarkota.go.id> di akses pada 1 November 2015 Pukul 20:00 Wita

031 Rappocini	73.377	77.714	74.811	79.373	75.948	80.717
040 Makassar	40.233	41.467	40.400	41.672	40.056	40.998
050 Ujung Pandang	12.684	14.220	12.829	14.372	12.498	13.988
060 Wajo	14.279	15.080	14.410	15.220	13.453	14.103
070 Bontoala	26.432	27.765	26.580	27.935	25.667	26.964
080 Ujung Tanah	23.380	23.308	23.597	23.532	23.519	23.317
090 Tallo	67.247	67.047	67.504	67.279	69.327	69.092
100 Panakukkang	69.996	71.386	70.439	71.869	71.749	73.248
101 Manggala	58.451	58.624	61.386	61.453	65.512	65.431
110 Biring kanaya	83.203	84.538	88.297	88.819	97.410	98.496
111 Tamalanrea	50.976	52.216	51.882	53.352	53.623	55.361
Jumlah	661.379	677.995	676.744	692.862	696.086	711.986

Sumber : Badan Statistik Kota Makassar

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk Kota Makassar menunjukan setiap bahwa tiap tahun jumlah penduduk Kota Makassar makin meningkat jumlahnya. Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2011 adalah Kecamatan Tamalate 170.878 jiwa dimana Jumlah Laki-laki sebanyak 84.474 jiwa dan Perempuan 86.404 jiwa, Namun pada tahun 2012 Jumlah penduduk Kecamatan Tamalate meningkat namun tidak signifikan dibanding Kecamatan Biringkanaya yang meningkat jauh yaitu 177.116 jiwa Laki-laki 88.297 dan Perempuan 88.819

dan pada tahun 2013 jumlah terbanyak masih di Kecamatan Biringkanaya yaitu 195.908 jiwa jumlah penduduk Laki-laki sebanyak 97.410 dan perempuan 98.496.

4. Keagamaan

Sebagai kota metropolitan yang memiliki masyarakat yang berasal dari berbagai suku bangsa dan agama, maka pemerintah Kota Makassar senantiasa memfasilitasi terwujudnya kerukunan untuk beragama, mengkoordinasikan segala bentuk kegiatan dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama serta menumbuhkan kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama.

Dalam hal keagamaan, di Kota Makassar terdapat beberapa agama yaitu Islam, Kristen, Budha, dan Hindu. Agama Islam merupakan agama mayoritas masyarakat Kota Makassar, data Departemen Agama Kota Makassar, tahun 2008 mayoritas beragama Islam dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam 1.132.348 orang dengan jumlah jemaah haji pada tahun 2007 sebanyak 1.106 orang, Penganut yang beragama Kristen 50.416 orang, jumlah pemeluk agama Katolik sebanyak 45.446 orang, Hindu sebanyak 57.791 orang, Budha sebanyak 10 orang, dan lain-lain 1 orang. Meskipun memiliki penganut agama yang berbeda, namun kerukunan antara umat beragama di Kota Makassar tetap terjaga dengan baik. Sedangkan sarana ibadah yang telah terbangun selama tahun 2008, mesjid sebanyak 867 buah, mushollah 112 buah, gereja Kristen 90 buah, gereja Katolik 57 buah, vihara/klenteng 23 buah.²⁹

²⁹ Dikutip di http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan di akses pada 1 November 2015 Pukul 20:00 Wita

B. Partai Nasdem

1. Gambaran Umum Partai Nasdem

Partai Nasdem adalah alat perjuangan baru agar Indonesia menemukan dan bukan sekedar praktek prosedural semata. Partai Nasdem hadir untuk menggelorakan semangat dan harapan bahwa perubahan harus terjadi. Partai di deklarasikan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2011. Partai Nasdem diinisiasi oleh kaum muda pergerakan untuk membumikan restorasi Indonesia, di antara mereka ada tiga mereka ada tiga serangkai Rio Capella seorang politisi, Sugeng Suparwoto seorang Jurnalis, dan Ahmad Rofiq aktifis gerakan yang menjadi motornya, selain mereka ada eksponen aktifis 98, kaum muda professional, advokat, LSM, Serikat Buruh, Organisasi Tani, dan Sebagainya.

2. Visi dan Misi Partai Nasdem

Kelahiran Partai Nasdem bukanlah semata-mata hadir dalam percaturan kekuasaan dan pergerakan kepentingan. Partai Nasdem berasaskan Pancasila. Adapun visi Partai Nasdem :

“Indonesia yang merdeka sebagai Negara bangsa,berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.”³⁰

Partai Nasdem bertujuan menggalang dan kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan perubahan untuk restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan mengembalikan Indonesia kepada tujuan dan cita-cita proklamasi 1945. Adapun misi Partai Nasdem.

³⁰ Buku Panduan Partai Nasdem (BAB II Pasal 4 Anggaran Dasar Partai).

- a. Membangun Politik Demokratis berkeadilan berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 sebagai kontrak politik kebangsaan.
- b. Menciptakan Demokrasi Ekonomi. Melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi Negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berjuang pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi di level lokal.
- c. Menjadikan budaya gotong royong sebagai karakter bangsa³¹

3. Tujuan dan Fungsi Partai Nasdem

Partai Nasdem bertujuan mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan berkedaulatan. Dengan semangat kebangsaan partai berfungsi sebagai untuk :

- a. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Mewujudkan Negara kesejahteraan sesuai mandate konstitusi

³¹ Buku Panduan Partai Nasdem (BAB II Pasal 5 Anggaran Dasar Partai).

- c. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif, dan beradab
- d. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip demokrasi ekonomi
- e. Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum
- f. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga Negara Indonesia
- g. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial-budaya yang egaliter berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika³²

4. Lambang dan Tanda Gambar Partai



Arti lambang sebagai berikut :

- o Lingkaran biru bermakna kemerdekaan berfikir, gagasan-gagasan baru, kecepatan mengambil keputusan keputusan, ketepatan bertindak, keberanian, kewaspadaan, kepercayaan diri dan keteguhan hati dalam berjuang.
- o Dua siluet berwarna orange bermakna gotong royong, harmonisasi antara modernitas dan kearifan local, menjunjung tinggi kesejahteraan, mengusung percepatan ekonomi dan keadilan distribusi pada saat yang sama. Warna oranye melambangkan kemakmuran, seperti warna padi yang

³²Buku Panduan Partai Nasdem (BAB II Pasal 5 Anggaran Dasar Partai).

siap panen, melambangkan gagasan yang selalu segar dan siap diimplementasikan

5. Keanggotaan dan Pendidikan Politik serta Sistem Kaderisasi Partai

Pada Bab V tentang Keanggotaan Pasal 10 dikatakan

- a) Anggota partai adalah warga Negara Indonesia yang menyetujui Anggaran Dasar –Anggaran Rumah Tangga dan mempunyai Anggota
- b) Anggota terdiri dari kader, anggota biasa, anggota kehormatan dan simpatisan
- c) Ketentuan tentang hak dan kewajiban serta rekrutmen keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pada Bab IV Pasal 12 pendidikan politik dikatakan :

- a. Partai menjalankan pendidikan politik secara eksternal dan internal
- b. Pendidikan politik eksternal diperuntukan untuk seluruh warga Negara Indonesia berupa pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan.
- c. Pendidikan politik internal berupa materi pengkaderan internal sesuai dengan jenjang dalam sistem kaderisasi.

Pada pasal 13 tentang sistem kaderisasi dikatakan Kader partai terdiri dari:

- a. Kader Tunas adalah anggota yang belum mengikuti pengkaderan.
- b. Kader Dasar adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang.
- c. Kader Madya, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

- d. Kader Paripurna, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat.
- e. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

6. Sejarah Lahirnya Partai Nasdem di Provinsi Sulawesi Selatan

Di awal terbentuknya Partai Nasdem di Sulawesi Selatan digagas oleh sekelompok Anak Muda, namun pembentukan awal tidaklah semulus Ormas Nasional Demokrat yang di Back Up oleh beberapa tokoh di Sulawesi Selatan, Partai Nasdem lahir dari buah karya anak muda Sulawesi Selatan yang sama sekali bukan tokoh dan memang tidak di back up oleh tokoh ataupun pengusaha, namun dengan niat dan semangat yang kokoh membuat anak muda tersebut sepakat untuk mewujudkan cita-cita Restorasi melalui Partai Nasdem. Maka dimulailah pertemuan kecil-kecilan dari Warkop ke warkop dan dalam waktu yang singkat struktur ditingkat Dewan Pimpinan Wilayah dapat diselesaikan yang berjumlah 11 orang.

Bermodalkan jaringan pertemanan dan keluarga 11 orang pengurus tersebut mengadakan jalinan komunikasi ke semua Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dari orang ke orang partai ini ditawarkan, namun ternyata tidak semua orang tertarik dengan Partai Nasdem yang pada waktu itu masih simpang siur apakah betul akan menjadi Parpol atau tidak dan kurang lebih 2 minggu 4 Kabupaten rampung struktur kepengurusannya, bermodalkan struktur kepengurusan ditingkat wilayah dan 4 struktur di Kab/Kota tersebut oleh Sanusi Ramadhan berangkat ke Jakarta untuk menerima SK dari DPP Partai Nasdem

yang saat tersebut dinahkodahi oleh H. Patriece Rio Capela, dan dalam waktu 1 minggu akhirnya SK pun terbit dan menjadi *Insulin* semangat bagi kepengurusan DPW Sulsel dalam merampungkan struktur di 24 kabupaten kota di provinsi Sulawesi Selatan.

Pertemuan perdana antara DPP dan calon pengurus di seluruh kabupaten/kota diprovinsi sulawesi selatan akhirnya dilakukan, tepatnya tanggal 15 April 2011 pertemuan di Hotel Clarion pun dilaksanakan, dengan brainstorming semangat yang dikomandoi oleh H. Patriece Rio Capela selaku ketua DPP Partai Nasdem dan Ahmad Rofiq selaku Sekjen akhirnya seluruh teman teman di setiap Kab/Kota bersepakat merampungkan struktur hingga ditingkat kecamatan, dan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan akhirnya Partai Nasdem lahir di 304 kecamatan.³³ Adapun Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan Periode 2013-2018 (Lihat Lampiran)

C. Partisipasi Politik Perempuan di Kota Makassar

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota

³³ Nurul Radiatul Adawiah “*Konflik Internal Partai Nasdem (Studi Tentang DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan)*” Skripsi (Makassar:Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Hasanuddin Makassar,2013), h. 56

parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial *direct action*nya, dan sebagainya³⁴

Peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional sesungguhnya telah terakomodasikan oleh berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Apabila ditelusuri dengan sistem hierarki ketatanegaraan di Indonesia yang merujuk pada landasan hukum keberlakuan sistem hierarki tersebut yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa urutan perundang-undangan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.

Secara administrative Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan, 143 kelurahan, 994 RW dan 4.966 RT. Dari data di KPU Kota Makassar Jumlah Pemilih perempuan pada tahun 2014 meningkat yaitu 504.815 Orang. Untuk melihat bagaimana Partisipasi Politik Perempuan di Kota Makassar pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 kita bisa melihat di berikut

³⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),. H. 367

Tabel 3

**Daftar Calon Legislatif Perempuan Kota Makassar Tahun 2014 Berdasarkan
Partainya**

GOLKAR	Bernadeth Anastasya	Astuti Kasmin	Neng Indriyani
	Hendarsa	Melani Mustari	Indriana Parenrengi
	A.Lely Rizkah	Gustiati	Elly Riastuti
	Andi Ida Andalia	Andi Besse Ferial	Murhartini Yunus
	Saenab	Sudarnia	
	Fatma Nur	Yuhaeda Husain	
GERINDRA	Prita Barlina S	Herlinda Pati	Kartini E.Galung
	Megawati T	Lisdayanti Sabri	Dahniar
	Immastini	Maria Sari P	Sitti Sarlina Chalik
	Andiasni	Indah Fajarwati Langga	Sherina Angriany
	Nurwina Badaruddin	Nurmalasari Yusuf	Merryan Christine K
	Ratnapada		
DEMOKRAT	Ardiyani Rasyid	Rismawati Zk	Anita
	Rosmala Dewi	Andi Candra Kusuma	Inin Septiani M
	Yusdaliah	Hamdaningsih	Nurlinda Salengke
	Rosmala Dewi S	Riny Iriani	Nurul Hidayat
	Yusdaliah	Made Sugiarti	Yuniar Tompo
	Fatma Wahyuddin	Hamsiah Sangkala	Widji Kartini
PAN	Irmawati	Andi Khaerati	Syuheria
	Rasmi Ridjang S	Nursyam Amalia I	St.Fatimah Wahab
	Rohani	Iriani Busthami	Hasmawaty S.M
	Nurmiah Sanusi	Henni Handayani	A.Anny Nurningsih
	Fadhillah	Jumriah	Haslinda
	Andi Sitti Rahmatiah	Sitti Nurbaya	
PPP	A.Aisyah Tenriwaru	Eka Rahayu Wahab	Nurhaedah
	Retno Dianawaty	Herniawati	Evie Andriana

	Wardawati	Nurfaida	Nurhayati
	Sitti Nurliah	Nasrawati	Rosvita Natsir
	Alfirah R	Sukma Taris	Mustari
	St.Rosmawati N	Zherly Angriani	
HANURA	Halimah	Kristina Parinsi	Andi Budihari
	Usni	Resky Indah Sari	Shinta Mashita M
	Pusriva Wahid	Deisy Thursiana	Erma Suryani
	Muslimah	Nurmiati	Sherly
	Rosmiati	A.Sri Rahayu	Sri Wahyuni
	Nur Ayu		
PBB	Nurhasanah	Hasniah	Miftah Khaerati
	Irma Herman	Nurhaena	Suriani
	Manzila Ardiani	Helmi Suarni	Andi Asmawati
	Asmira	Hasna Lingga	Sukmawati Wahab
	Nur Kalsum	Nurdiana	Rizki Maharani
	Rosmawati		
PKPI	Musdalifah Tajuddin	Yudriani	Deasy Lolong
	Gempita Anggun	Hilmiyah Nur	Maria Liberti
	Hasnawati	Yohana Lobo	Kasmawati Nur
	Sriyanti Amir	Mulyati	Sulastris
	Indar Kutau	Julina S	Novianus P
	Audhianty Dwi Tantri		

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar 2014

Data di atas berisi mengenai Daftar Calon Legislatif Perempuan Kota Makassar Tahun 2014 Berdasarkan Partainya. Dan dimana kita bisa melihat antusias perempuan Kota Makassar pada pemilihan calon legislatif di Kota Makassar yang telah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan.

Tabel 4

Nama Anggota Legislatif Kota Makassar Periode 2014-2019 dan jabatannya

Nama	Jabatan
Haslindah	Komisi A
Hj.Fatmah wahyuddin	Komisi B
Yeni rahman	Komisi B
A.Vivin Sukmasari	Komisi C
Hj.lisdayanti sabri	Komisi D
Shinta mashita	Komisi D
Melani mustari	Komisi D
Indira mulyasari	Wakil ketua DPRD III

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar 2014

Peran perempuan dalam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar sangat signifikan berdasarkan kuantitatif dan kualitatif dari tahun 2009-2019 semakin bertambah. Tahun 2009-2014 berjumlah 7 kaum perempuan, sedangkan pada tahun 2014-2019 naik 1 kursi menjadi 8 kaum perempuan. Data itu membuktikan bahwa kaum perempuan semakin bertambah dari tahun-ketahun, meskipun jumlah tersebut tidak mencapai 30% syarat kuota yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum. Dan salah satu dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar periode 2014-2019 yang terpilih dan memiliki jabatan yang strategis di dewan adalah seorang kader perempuan Partai Nasdem Kota Makassar.

BAB III

PEMBAHASAN

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Ungkapan “setiap warga Negara” dalam ketentuan tersebut di atas tentu saja berarti warga negara laki-laki maupun negara perempuan. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, berdasarkan ketentuan Pasal 27 tersebut dapat diartikan pula bahwa UUD 1945 sudah menganut prinsip non diskriminatif. Dengan prinsip non diskriminatif tersebut, maka perempuan sebagai warganegara dapat dikatakan memperoleh peluang yang sama dengan laki-laki dalam pemerintahan.

Peluang bagi perempuan untuk masuk ke arena politik praktis selangkah lebih maju dibandingkan sebelumnya, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang baru. Dalam Pasal 53 ditentukan bahwa daftar bakal calon membuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, dan dalam Pasal 55 ayat 2 menentukan bahwa dalam daftar bakal calon yang dimaksud itu, setiap tiga bakal calon di dalamnya terapat sekurang-kurangnya satu bakal calon perempuan. Pasal ini menunjukkan adanya peluang yang cukup besar bagi perempuan, asalkan Partai Politik engan konsekuen dan betul-betul mempunyai komitmen melaksanakan amanat yang terkandung didalamnya. Seperti yang dikemukakan oleh Anggriani Alamsyah

“....Secara teoritis perempuan itu sebenarnya diakui peranannya ketika muncul teori –teori yang berbaur feminism, nah tapi sebenarnya kita sebagai seorang muslim Al-Qur’an sudah jauh-jauh hari mengakui peran perempuan karena perempuan itu harus dihargai dan munculnya gerakan perempuan tapi kita diindonesia walaupun tidak secara tertulis sebenarnya perempuan itu diakui keberadaanya dan perannya tapi mungkin ada sebagian masyarakat yang tidak mengakui itu . Untuk mengakomodir itu kita muncul Perundangan mengenai jatah 30% keterwakilan perempuan, hanya masalahnya sekarang kadang-kadang perempuan itu lebih senang berkarir di tempat lain dibanding berkarir di politik dari beberapa penelitian sebelumnya mereka lebih suka itu karena apa politik itu kadang-kadang repot sekali kalau mau duduk di dewan harus keluar uang banyak, harus kerja sana-sini, kasarnya mungkin harus punya uang banyak dan usaha. Makanya kuota 30% itu tidak terakomodasi dengan baik, nah kalau saya lihat ini di Nasdem mungkin ada tawaran-tawaran yang menarik yang mereka berikan sampe ada orang yang tertarik masuk di Nasdem seperti Drg.Rachmatika trus seorang penyanyi Dian eka wati segala macam mungkin ada tawaran tawaran sehingga mereka bergabung di Nasdem, dan yang kedua saya lihat di Nasdem itu dia tidak mengikat orang secara politik artinya ketika kamu didalam jadilah dirimu sendiri , bupati, gubernur yang dia dukung tidak ada perjanjian-perjanjian politiknya bahwa kau harus golkan kami atau segala macam itu yang saya lihat dari komitmennya selama ini. Dikatakan juga oleh Surya Paloh, kalau saya melihatnya kenapa Nasdem sebagai partai baru dan bisa banyak koutanya terpenuhi itu karena itu mereka punya tawaran yang menarik dalam artian tawaran yang mungkin tidak dipunyai oleh partai-partai lain partai islam sekalipun kalau saya lihatnya begitu³⁵,”

Dalam Undang-Undang Partai Politik yang baru, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 merumuskan dengan lebih tegas dari undang-undang sebelumnya, dan lebih menjamin keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 5 yang menentukan sebagai berikut: “Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan.” Dalam pasal 20 juga ditentukan bahwa : “Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal

³⁵ Wawancara dengan Anggriani Alamsyah sebagai Akademisi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Selasa 16 Februari 2016 Pukul 15:24 Wita

19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan rendah 30% yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.³⁶

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian “Representasi Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar” sesuai dengan rumusan masalah yaitu, Bagaimana peran politik perempuan dalam Partai Nasdem Kota Makassar dan Implikasi dari peran politik perempuan Partai Nasdem Kota Makassar bagi penguatan posisi politik perempuan.

A. Peran Politik Perempuan dalam Partai Nasdem Kota Makassar

“Tiada demokrasi tanpa keterlibatan perempuan”. Demikian ujaran dalam setiap pelajaran politik, yang mengisyaratkan adanya pengakuan fundamental terhadap (aktivitas) perempuan dalam partai politik. Peran perempuan dalam ranah politik di Indonesia bisa dikatakan masih minim, dan aspirasi kaum perempuan cenderung diabaikan. Di Indonesia negara yang masih cenderung Patriarkal suara perempuan kurang didengarkan, meski di zaman modern ini telah banyak pergerakan perempuan mulai dari organisasi hingga partai politik, namun dalam prakteknya suara perempuan diredam oleh kepentingan kaum laki-laki. Sejarah, budaya dan ideologi dapat dikatakan sebagai latar belakang keterpurukan peran perempuan dalam politik di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa budaya di Indonesia yang pada umumnya menempatkan posisi pada perempuan sebagai pihak yang berperan untuk mengurus aktivitas non politis seperti mengurus rumah tangga, anak dan sebagai pendamping kaum laki-laki membentuk sebuah konstruksi yang menyulitkan perempuan untuk bergerak ikut

³⁶ Luh Putu Sridanti, 2015 “Peranan Politik Perempuan di Indonesia Peluang dan Hambatan”, Jurnal STISIP Margarana h. 2

serta dalam ranah sosial politik. Adapun peran politik perempuan dalam Partai Nasdem Kota Makassar kita bisa melihatnya dari uraian di bawa ini

A.1.Peran Politik Perempuan dalam Partai Nasdem Kota Makassar pada Masyarakat

Keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan merupakan suatu anugerah bagi keberlanjutan suatu negara. Ibarat negara sebuah rumah tangga, maka perempuan-lah yang memiliki peran untuk mengurus rumah serta mengatur hajat hidup seluruh penghuni rumah tersebut. Maka, dapat dipastikan bahwasanya perempuan memiliki andil yang luar biasa dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Di masyarakat sendiri peran perempuan Nasdem Kota Makassar belum terlalu signifikan karena Partai Nasdem termasuk partai yang baru hadir di di kancah perpolitikan indonesia, namun perempuan Partai Nasdem Kota Makassar sendiri sangat aktif ketika membahas isu-isu mengenai perempuan anak dan kesejahteraan rakyat. Kepedulian perempuan Nasdem terhadap isu yang terjadi di makassar juga sangat cepat tangkap, itu dibuktikan ketika salah satu daerah yang terkena bencana banjir kebakaran dan sebagainya pasti kader perempuan Nasdem Kota Makassar turun langsung ke lokasi untuk memberikan bantuan kepada korban yang ada dilapangan. Seperti yang diungkapkan oleh Rachmatika Dewi sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Makassar sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam wawancara

“di dalam Partai Nasdem Kota Makassar itu sendiri ketika mendengar sebuah daerah terjadi musibah apakah itu kebakaran banjir dan sebagainya pasti ada kader perempuan yang muncul untuk mengecek langsung

kelokasi untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh korban, dengan begitu kita bisa membantu kebutuhan apa yang diperlukan korban.”³⁷

Dari wawancara di atas kita bisa melihat bagaimana kepekaan perempuan dalam menghadapi suatu sosial yang menjadi modal politik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selain itu Andi Nurhani Nurdin sendiri sekali kali memberikan pelatihan kepada masyarakat rappocini untuk mendaur ulang sampah seperti pada wawancara di bawa ini

“...terkadang saya memberikan sedikit pelajaran untuk mendaur ulang gelas-gelas plastik kepada ibu rumah tangga yang ada di sekitar rappocini, disini saya kasihki anak anak tugas untuk mengumpulkan gelas minuman bekas nanti saya kasih ki uang sesuai dengan geals yang dia dapat, lalu gelas tersebut diolah oleh ibu rumah tangga yang ada di rappocini menjadi sebuah tas atau hiasan rumah”³⁸

Selain itu perempuan perempuan Partai Nasdem juga sering melakukan interaksi dengan anak anak muda di makassar itu dibuktikan dari salah satu kader Nasdem yang bernama Andi Nurhani Nurdin beliau merangkap sebagai pembina suporter bola PSM yang biasa disebut The Mazc Man dengan menjadinya pembina suporter ini dengan jalan ini beliau membina anak-anak muda makassar untuk melakukan hal-hal positif dan memberikan pelajaran mengenai politik bagi pemilih pemula yang ada di The Mazc Man. Dan juga memberikan sedikit.

³⁷ Wawancara dengan Rachmatika Dewi sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Makassar sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa 7 Desember 2015 Pukul 15:00 Wita

³⁸ Wawancara dengan Andi Nurhani Nurdin Ketua DPC Ujung Pandang , Jumat 11 Desember 2015 pukul 10:00 Wita

A.2.Peran Politik Perempuan dalam Partai Nasdem Kota Makassar pada Institusi Partai

Peran politik perempuan dalam dunia politik seakan beraneka ragam. Wilayah cakupan politik yang mampu dimainkan masih sebatas wacana dalam diskusi dan pelatihan. Dalam pengumpulan politik, sebenarnya perempuan bisa menembus apa saja dengan kualitas yang dimilikinya. Ia mampu menjadi pemimpin dari tingkat kepala desa sampai presiden dan wilayah publik yang signifikan. Namun harapan itu sangat jauh dari kenyataan di lapangan. Perempuan banyak yang ditolak oleh komunitasnya sendiri ketika ingin berperan lebih. Banyak kalangan perempuan yang tidak siap dan mendukung ketika sesama perempuan maju bersaing dalam sebuah ranah politik. Ketiadaan dukungan dari sebagian perempuan tentu didasari oleh stigma masyarakat yang menilai perempuan cukup jadi makmum saja. Sehingga kesempatan tersebut kandas dan dimainkan oleh laki-laki kembali. Pertarungan di wilayah politik memang penuh intrik antara siapa mempengaruhi siapa. Persoalan pengaruh inilah yang harus digalang dari solidaritas kaum perempuan untuk memberi kepercayaan kepada para perempuan yang berkualitas dalam bidangnya. Pembelaan dari sesama kaum perempuan perlu menjadi cetak biru jika ingin manabrak budaya yang mendominasi.³⁹ Hal yang sama diungkapkan oleh Rachmatika Dewi sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Makassar

“....Partai Nasdem memang baru, namun kita datang dengan membuat suatu Restorasi perubahan dengan memberikan Perempuan peluang yang besar untuk turun di dunia politik, mereka juga diberikan keistimewaan

³⁹ Lihat dalam www.cetro.or.id/perempuan.html, tentang “Pentingkah Perempuan Duduk Dalam Lembaga Politik? Dan lihat pula laporan berjudul “Tahukah Anda, Beberapa Jumlah Perempuan Dalam Lembaga Politik Indonesia?”

seperti halnya diberikan posisi posisi strategis baik dikepengurusan partai atau di legislatif. Peran perempuan dalam Partai Nasdem Kota Makassar sangat membantu jalannya kepengurusan partai dan membantu hubungan kami dengan masyarakat. Dengan adanya perempuan kita bisa lebih peka terhadap masalah masalah yang ada dimasyarakat, karena perempuan lebih peka dibandingkan laki-laki. Partai Nasdem Kota Makassar menempatkan perempuan secara adil itu dibuktikan dari Pemilu lalu pada pemberian No.urut, Selain itu di Partai Nasdem memiliki wadah untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam suatu wadah yang disebut Garnita malahayati Nasdem. Yang menjadi tempat perempuan perempuan Nasdem kota makassar berbagi informasi mengenai isu politik perempuan anak dan kesejahteraan rakyat, selain itu di dalam Partai Nasdem kota makassar perempuan memiliki andil dalam kegiatan pengkaderan kader perempuan untuk mempersiapkan kader perempuan yang lebih siap bertarung di tahun 2019”⁴⁰

Dari pendapat di atas kita bisa melihat bagaimana peran perempuan di Partai Nasdem Kota Makassar yang dianggap sangat penting dalam hal mewakili suara perempuan di bidang politik karena perempuan memiliki kepekaan yang sangat besar dibanding laki-laki dengan kepekaan itu perempuan bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan. Partai Nasdem sendiri memberikan keistimewaan tersendiri kepada perempuan untuk terjun di bidang politik sehingga partisipasi perempuan bisa meningkat demi menyuarakan suara perempuan. Dengan adanya Garda Perempuan yang didasarkan atas dasar pemikiran gender, dimana perempuan pun diberikan kebebasan menentukan sistem politik dan terlibat dalam aktifitas politik. Partai Nasdem berupaya merekrut perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan dan kemampuan untuk mau terlibat dalam politik. Hal yang sama dikemukakan oleh Indira Mulyasari Pramastuti sebagai Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak

⁴⁰ Wawancara dengan Rachmatika Dewi sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Makassar sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa 7 Desember 2015 Pukul 15:00 Wita

“....Partai Nasdem sangat mengusung perempuan untuk menduduki posisi posisi penting di politik, karena partai partai lain belum ada yang berani menempatkan perempuan pada posisi posisi penting. inilah yang membedakan Partai Nasdem dengan partai-partai yang lain. Kita bisa melihat ada dua perempuan yang memiliki posisi posisi penting dalam parlemen yaitu saya sendiri sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dan satu lagi Ibu Rachmatika Dewi sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang kebetulan beliau ialah Ketua Partai Nasdem Kota Makassar. Dikepengurusan Partai Nasdem Kota Makassar sendiri mengakomodir 30% perempuan dan dipengurus harian kami menempatkan 4 perempuan diposisi wakil ketua. Mengedepankan perempuan adalah salah satu tujuan Partai Nasdem supaya terlihat juga perempuan juga bisa bersaing dan memiliki peran yang penting dalam politik bukan hanya laki-laki saja.⁴¹”

A.3 .Peran Politik Perempuan dalam Partai Nasdem Kota Makassar pada Lembaga Legislatif

Di Indonesia sendiri hak untuk memilih dan dipilih yang setara antara laki laki dan perempuan sudah berlaku sejak pemilu 1995 sampai sekarang. Namun dalam realitasnya partisipasi perempuan dalam menjadi calon legislatif masih belum memenuhi harapan. UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum Anggota, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 53 menegaskan bahwa daftar calon anggota legislatif memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, namun usaha meningkatkan status dan peran perempuan sama sekali belum maksimal jika dibandingkan laki-laki. Jumlah perempuan wakil rakyat di DPRD secara kuantitas belum sesuai UU. kaum perempuan adalah masyarakat mayoritas di Indonesia dan tentunya perempuan punya segudang aspirasi untuk disampaikan dan dilaksanakan, walau beberapa aspirasi dapat disampaikan melalui kaum laki-laki yang memimpin dan mampu

⁴¹ Wawancara dengan Indira Mulyasari Pramastuti sebagai Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Kamis 14 Januari 2016 Pukul 11:00 Wita

mendengarkan suara perempuan, tetap saja laki-laki bukanlah perempuan walau kaum laki-laki selembut dan mempunyai jiwa feminim namun laki-laki tidak dapat mempunyai cita dan rasa perempuan.

Hal ini lah yang menyebabkan mengapa perempuan harus menjadi bagian dalam politik, pemerintahan dan pengambilan kebijakan. Karena hanya kaum perempuan lah yang mampu mengerti permasalahan mereka dan bagaimana cara penyelesaiannya. Kebanyakan suara aspirasi dari perempuan tidak tersampaikan dalam pembuatan kebijakan di pemerintahan karena perlunya representatif yang menampung aspirasi kaum perempuan.

Keikutsertaan kaum perempuan dalam dunia politik merupakan suatu hal yang sering dibicarakan. Pernyataan bahwa politik adalah dunia laki-laki bila dikaitkan dengan perempuan dalam bidang politik merupakan dua hal yang saling berlawanan. Karena politik jika dikaitkan dengan maskulinitas merupakan sesuatu yang bertentangan dengan feminitas. Peran politik perempuan itu sangat memiliki peranan penting dalam menyuarakan suara perempuan, karena tanpa ada keterwakilan perempuan dalam hal politik maka kebijakan yang akan timbul akan tidak pro terhadap perempuan, maka dari itu peran perempuan dalam hal politik sangat di butuhkan. Hal yang sama diungkap Mario David PN sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenang Pemilihan Umum

“....peran politik perempuan di Partai Nasdem itu sendiri sangat penting itu dibuktikan DPD Partai Nasdem Kota Makassar yang dipimpin oleh seorang Perempuan sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Yaitu Rachmatika Dewi Y. Perempuan di Partai Nasdem diberikan ruang yang sangat luas untuk berpolitik dengan pontesi yang dimiliki perempuan tersebut dibidang politik. Di Partai Nasdem sendiri memberikan posisi posisi yang bagus buat perempuan di kepengurusan partai. perempuan juga memiliki banyak potensi di politik apalagi sudah di

back up oleh Undang Undang , namun masih banyak perempuan yang belum sadar bawah atas peluang peluang yang ada untuk mewakili suara perempuan di parlemen, itu karena kurang percaya diri dengan potensi yang ada pada dirinya dan masih banyak yang menganggap bahwa politik itu kasar,kotor dan kejam. Dengan adanya perempuan di parlemen itu sangat membantu keterwakilan perempuan dalam hal penentuan kebijakan sehingga kebijakan itu bisa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan perempuan itu sendiri⁴²,”

Dari pendapat di atas kita bisa melihat peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, itu juga telah diamanatkan oleh konstitusi kita Undang-undang Dasar Tahun 1945, pada penggalan Pasal 28D ayat 1 berbunyi “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam politik, berperan dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan, dan berperan dalam bentuk apa pun pemi kemajuan dan keutuhan negara tercinta yakni Negara Nesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 amandemen kedua mengamanatkan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Pastilah kita kenal tokoh perempuan yang pertama menjadi Presiden Perempuan di Indonesia,dia adalah Ibu Megawati Soekarnoputri, menteri juga banyak dari kalangan perempuan, salahsatunya Ibu Siti Fadilah Supari, pernah menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ditingkat Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten, bahkan yang jadi Walikota dari kalangan perempuan bisa dibilang banyak jumlahnya di Indonesia ini. Mengenai persamaan yang di amanahkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ada juga di Pasal 28H ayat (2) yakni berbunyi

⁴² Wawancara dengan Mario David PN sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenang Pemilihan Umum sekaligus sebagai Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Makassar, Selasa 21 Desember 2015 Pukul 15:00 Wita

“setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Jadi, tidak ada yang bisa menyangkal bahwasannya perempuan juga bisa berperan dalam berbagai bidang yang biasanya dilakukan para lelaki, karena itu semua sudah dijamin oleh konstitusi kita serta dalam kenyataannya juga telah terbukti. Tak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Indira Mulyasari Pramastuti sebagai Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak

“...perempuan di parlemen itu salah satu bukti kalau keterwakilan perempuan sudah ada yang mewakili namun belum terlalu signifikan itu dibuktikan dengan pembuatan rancangan peraturan daerah mengenai Air Susu Eksklusif yang sementara pembahasannya.”⁴³

B. Implikasi dari Peran Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar bagi Penguatan Posisi Politik Perempuan

Selama ini dapat dipahami bahwa perempuan tidak pernah diikutsertakan dalam berbagai perumusan kebijakan dan perundang-undangan sehingga implikasinya sangat merugikan perempuan⁴⁴. Selama ini posisi perempuan sebagai mayoritas pemilih belum memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kepentingan politik perempuan⁴⁵, bahkan ada kecenderungan kuat bahwa setiap pemilu partai politik akan menggunakan isu kuota 30% sebagai salah

⁴³ Wawancara dengan Indira Mulyasari Pramastuti sebagai Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Kamis 14 Januari 2016 Pukul 11:00 Wita

⁴⁴ Sebagai contoh dalam ketenagakerjaan, perempuan menerima upah lebih rendah daripada laki-laki karena berbagai praktik diskriminasi dalam bidang perburuhan. Perempuan menempati angka 70% dari 500.000 buruh migran Indonesia yang setiap tahun mencari pekerjaan di luar negeri. Kasus kekerasan terhadap buruh migrant Indonesia tersebut lebih banyak menjadikan perempuan sebagai korban karena seksualitasnya. Dalam bidang kesehatan khususnya kesehatan reproduksi tercatat angka kematian ibu yang tinggi yaitu 390 per 100.000 merupakan angka tertinggi di ASEAN.

⁴⁵ Kurniawati Hastuti, *Belajar dari Kemenangan Perempuan Australia*, (Jakarta : Kompas, 2004), h. 36

satu strategi dalam meraih dukungan suara perempuan. Artinya suara perempuan hanya menjadi alat pengumpul suara dan belum menjadi alat control terhadap kekuasaan atau kebijakan negara berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan perempuan.

Saat ini masalah perempuan dalam politik⁴⁶ dalam pengambilan keputusan telah mejadi isu global karena beberapa alasan. Pertama, pemerintahan oleh (mayoritas) laki-laki dengan perspektif laki-laki (dengan sendirinya lebih menguntungkan laki-laki), tidak dapat melegitimasi “prinsip pemerintahan untuk rakyat oleh rakyat” sebagai esensi demokrasi. Hal ini disebabkan di antaranya, hak- hak politik perempuan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, bahwa dalam demokrasi pandangan dari kelompok yang berbeda- beda termasuk berbeda jenis kelamin harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan, dan perempuan adalah separuh penduduk dunia dan separoh dari jumlah penduduk masing-masing negara. Hal yang sama di ungkapkan oleh Rachmatika Dewi sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Makassar.

“....Implikasi dari Peran Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar bagi Penguatan Posisi Politik Perempuan sangat berdampak positif dengan kehadiran perempuan di dunia politik, kebijakan kebijakan menagani perempuan sudah ada yang memperjuangkan, karena yang kita ketahui bahwa kebijakan kebijakan itu banyak di buat oleh kaum laki-laki yang tidak tau bagaimana kebutuhan perempuan itu. Setiap Pemilihan umum

⁴⁶ Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi. Tugasnya memakmurkan bumi untuk kesejahteraan manusia.(Q.S. Al Baqarah, 30, Hud, 61). Ini adalah teks-teks suci yang mengisyaratkan keharusan manusia untuk berpolitik. Al Qurthubi menyatakan bahwa ayat dalam surah al Baqarah ini menunjukkan keharusan manusia mengangkat pemimpin pemerintahan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, menegakkan hukum dengan benar dan mewujudkan keadilan serta hal-hal penting lain yang diperlukan bagi kehidupan bersama. Ini semua merupakan urusan-urusan politik.

tingkat perwakilan perempuan di parlemen bertambah setiap pemilihannya walaupun belum signifikan jumlah yang bertambah tapi itu sudah membantu keterwakilan perempuan di parlemen. Tetapi di DPRD sendiri dalam pengambilan kebijakan adalah kolektif kolegial, hasil kebijakan tergantung dari suara yang terbanyak, maka dari itu peran perempuan di parlemen belum bisa memberikan hasil yang sangat signifikan. Dan saat ini kami perempuan yang ada di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah menghasilkan satu produk Peraturan Daerah mengenai Pengarus Utamaan Gender yang akan disahkan akhir Januari 2016⁴⁷,”

Peran seorang wakil dalam representasi politik menjadi sangat penting bagi masyarakat yang diwakilinya. Seperti yang tertulis dalam kutipan di atas bahwa seorang wakil membuat sebuah kebijakan untuk perempuan yaitu pihak yang diwakili untuk bertindak berdasarkan kepentingan yang diwakilinya. Di samping itu pihak yang diwakili menaruh kepercayaan kepada wakilnya, dan inilah sebenarnya pondasi dari representasi politik.

Adanya sistem kuota bagi calon politisi perempuan ini menyebabkan perhatian masyarakat luas mulai terarah pada masalah keberadaan perempuan di kancah politik Indonesia, Representasi politik perempuan merupakan salah satu tolak ukur sampai tahap mana sebuah proses demokrasi membuahkan hasil. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Nurhani Nurdin Ketua DPC Ujung Pandang

“....Adanya perwakilan perempuan di parlemen itu sangat membantu perempuan dalam hal penguatan posisi politik perempuan karena kita ketahuilah di kalangan masyarakat yang masih banyak menganggap bahwa politik itu kotor, kejam dan kasar yang banyak membuat perempuan tidak mau berpolitik. Terjunnya perempuan di politik sangat membantu dalam hal penentuan kebijakan karena kepekaan perempuan terhadap suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam Partai Nasdem sendiri ada dua kader nasdem duduk di legislatif dengan posisi strategis yaitu ibu

⁴⁷ Wawancara dengan Rachmatika Dewi sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Makassar sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa 7 Desember 2015 Pukul 15:00 Wita

rachmatika dewi ketua DPD Partai Nasdem Kota Makassar sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Ibu Indira Mulyasari wakil ketua bidang kesehatan, perempuan dan anak sebagai wakil ketua DPRD Kota Makassar.^{48,}

Representasi politik perempuan merupakan salah satu tolak ukur sampai tahap mana sebuah proses demokrasi membuahkan hasil. Fakta yang dapat diamati di parlemen saat ini baik secara kuantitatif maupun kualitatif menjadi pertanyaan yang menyerang balik gerakan perempuan Indonesia mengenai sejauh mana gerakan berhasil mendorong terbangunnya kesadaran akan representasi politik perempuan. Walaupun implikasi yang dihasilkan oleh peran politik perempuan terhadap keterwakilan politik di dewan itu tidak signifikan tetapi itu sudah menyuarakan suara perempuan seperti yang diungkapkan Indira Mulyasari Pramastuti sebagai Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak

“....Dengan adanya peran politik perempuan di politik itu menunjukkan bahwa kesadaran perempuan terhadap posisi perempuan itu sangat penting untuk mempengaruhi hasil kebijakan yang ada di parlemen karena kebanyakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu banyak bersentuhan langsung dengan perempuan contohnya saja ketika pemerintah memutuskan harga BBM naik maka akan berpengaruh terhadap perempuan bagaimana mengahandel efek dari kebijakan pemerintah itu. Peluang bagi perempuan untuk berperan di bidang politik tidak dapat dimungkiri lagi oleh setiap partai politik peserta pemilu untuk tidak hanya dijadikan sekedar komitmen politik secara de jure sebagai norma hukum tetapi sudah harus dijadikan realita politik untuk dapat direalisasikan secara nyata dan terukur dalam meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam kepengurusan partai politik peserta pemilu di tingkat pusat dan peningkatan jumlah keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Nah buat di DPRD Kota Makassar sendiri saya dan teman teman perempuan sementara membahas satu produk Peraturan Daerah Mengenai Air Susu Eksklusif dan

⁴⁸ Wawancara dengan Andi Nurhani Nurdin Ketua DPC Ujung Pandang , Jumat 11 Desember 2015 pukul 10:00 Wita

kebetulan saya pribadi yang menjadi kordinator penganggas Produk Peraturan Daerah ini^{49,}

Perempuan dalam politik jelas mempunyai banyak kelebihan, ia tidak hanya akan bisa mengontrol keinginan laki-laki yang sering mau benar sendiri, rasional dan tanpa kompromi. Politik juga butuh kesabaran, keuletan, pantang menyerah yang biasanya melekat pada diri perempuan. Intinya adalah hidup ini adalah keseimbangan karena keterlibatan perempuan pada politik untuk mencapai keadilan pada akhirnya muaranya apa lagi kalau bukan usaha menciptakan keseimbangan tersebut

“...Dampak yang ditimbulkan dari peran perempuan dipenguatan posisi perempuan itu sangat bertampak itu ditunjukkan keterwakilan perempuan diparlemen di setiap pemilihan umum ada peningkatan jumlah anggota terpilih, itulah hasil dari undang undang yang memback up perempuan dalam hal keterwakilan perempuan, melihat juga dari potensi potensi yang dimiliki oleh politisi perempuan dalam hal mempengaruhi kebijakan diparlemen .⁵⁰

Dengan adanya peran politik perempuan itu sebagai salah satu penguatan posisi perempuan walaupun untuk saat ini belum memberi banyak kontribusi dalam hal pembuatan kebijakan, penentu kebijakan, namun dengan adanya perempuan dipolitik itu sudah mewakili suara perempuan di parlemen.

Pertarungan diwilayah politik memang penuh intrik antara siapa mempengaruhi siapa. Persoalan pengaruh inilah yang harus digalang dari solidaritas kaum perempuan untuk memberi kepercayaan kepada para perempuan yang berkualitas dalam bidangnya. Pembelaan dari sesama kaum perempuan

⁴⁹ Wawancara dengan Indira Mulyasari Pramastuti sebagai Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Kamis 14 Januari 2016 Pukul 11:00 Wita

⁵⁰ Wawancara dengan Mario David PN sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenang Pemilihan Umum sekaligus sebagai Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Makassar, Selasa 21 Desember 2015 Pukul 15:00 Wita

perlu menjadi cetak biru jika ingin manabrak budaya yang mendominasi. Kesiapan perempuan untuk maju secara berani mengambil inisiatif dalam segala kebijakan menyangkut hidupnya dan kebaikan masyarakatnya penting diartikulasikan. Penguatan sipil sebagai bangunan kokoh suatu tatanan negara selayaknya menjadi konsen para aktivis perempuan untuk mendampingi kalangan perempuan yang tertinggal. Karena kita tidak mungkin maju sendirian, sementara para perempuan yang lain masih tertinggal pengetahuannya dan terbelenggu oleh mitosnya sendiri yang membelenggu kiprahnya di bidang politik. Perjuangan Kartini masih tetap relevan dengan situasi masa kini. Karena pada intinya, perjuangan Kartini adalah perjuangan pembebasan atas ketertindasan melalui pendidikan dan pengajaran. Perjuangan Kartini, yang sudah berumur satu abad lebih. Tetapi, masih kita saksikan banyak perempuan terpuruk karena terbatasnya perolehan mereka di bidang pendidikan. Terbatasnya modal pendidikan itu membuat terbatasnya lapangan kerja bagi mereka dan ini menimbulkan rentannya wanita terhadap kekerasan dan penindasan.

“....Implikasi peran politik perempuan itu Belumpi begitu besar artinya apalagi di Sulawesi Selatan kesannya agak-agak mengikut pada *mainstream* jadi mereka belum ada penelitian yang menjelaskan belum ada kebijakan yang mengarusutamakan perempuan saya belum pernah lihat yang begitu yah walaupun ada kebijakan perempuan tapi belum terlalu nyata pi.”⁵¹

Implikasi peran perempuan diparlemen belum begitu besar dalam mewakili perempuan karena kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu hanya mengikuti tren dan tidak ada tindak lanjut dari kebijakan yang dihasilkan,

⁵¹ Wawancara dengan Anggriani Alamsyah sebagai Akademisi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Selasa 16 Februari 2016 Pukul 15:24 Wita

kalaupun ada tidak lanjut dari kebijakan yang dihasilkan itu belum terlalu signifikan



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Keikutsertaan kaum perempuan dalam dunia politik merupakan suatu hal yang sering dibicarakan. Pernyataan bahwa politik adalah dunia laki-laki bila dikaitkan dengan perempuan dalam bidang politik merupakan dua hal yang saling berlawanan. Karena politik jika dikaitkan dengan maskulinitas merupakan sesuatu yang bertentangan dengan feminitas. Peran politik perempuan itu sangat memiliki peranan penting dalam menyuarakan suara perempuan, karena tanpa ada keterwakilan perempuan dalam hal politik maka kebijakan yang akan timbul akan tidak pro terhadap perempuan, maka dari itu peran perempuan dalam hal politik sangat di butuhkan. Adapun peran politik perempuan dalam Partai Nasdem Kota Makassar kita bisa melihatnya dari uraian di bawa ini

1.a .Peran politik Perempuan dalam Partai Nasdem Kota Makassar pada Masyarakat

Di masyarakat sendiri peran perempuan Partai Nasdem Kota Makassar itu sangat aktif ketika membahas isu-isu mengenai perempuan anak dan kesejahteraan rakyat. Kepedulian perempuan Nasdem terhadap isu yang terjadi di makassar juga sangat cepat tangkap, itu dibuktikan ketika salah satu daerah yang terkena bencana banjir kebakaran dan sebagainya pasti kader perempuan Nasdem Kota Makassar turun langsung ke lokasi untuk memberikan bantuan kepada korban yang ada dilapangan

Selain itu perempuan perempuan Partai Nasdem juga sering melakukan interaksi dengan anak-anak muda di Makassar itu dibuktikan dari salah satu kader Nasdem yang bernama Andi Nurhani Nurdin beliau merangkap sebagai pembina suporter bola PSM yang biasa disebut The Mazc Man dengan menjadinya pembina suporter ini dengan jalan ini beliau membina anak-anak muda Makassar untuk melakukan hal-hal positif dan memberikan pelajaran mengenai politik bagi pemilih pemula yang ada di The Mazc Man.

1.b .Peran Politik Perempuan dalam Partai Nasdem Kota Makassar pada Institusi Partainya

Peran perempuan di Partai Nasdem Kota Makassar pada institusinya sendiri dimana Partai Nasdem sendiri memberikan keistimewaan tersendiri kepada perempuan untuk terjun di bidang politik sehingga partisipasi perempuan bisa meningkat demi menyuarakan suara perempuan. Dengan adanya Garda Perempuan yang didasarkan atas dasar pemikiran gender, dimana perempuan pun diberikan kebebasan menentukan sistem politik dan terlibat dalam aktifitas politik. Partai Nasdem berupaya merekrut perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan dan kemampuan untuk mau terlibat dalam politik.

1.c .Peran Politik Perempuan dalam Partai Nasdem Kota Makassar pada Lembaga Legislatif

Dengan hadirnya perempuan di legislatif bukan hanya ajang untuk merebut kekuasaan, namun bagaimana kekuasaan ini dimaknai sebagai perjuangan untuk memberikan posisi tawar kepada masyarakat marjinal. Itu dibuktikan dengan pengajuan beberapa produk peraturan daerah terkait dengan

perempuan diantaranya rancangan peraturan daerah mengenai Air Susu Eksklusif yang sementara pembahasan.

2. Implikasi dari peran politik perempuan Partai Nasdem Kota Makassar bagi penguatan posisi politik perempuan dimana Partai Nasdem Kota Makassar perempuan diberikan hak yang sama dengan laki laki dalam berpolitik itu dibuktikan di Partai Nasdem Kota Makassar sendiri dipimpin oleh seorang perempuan yang juga terpilih menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel. Selain ketua DPD Partai Nasdem Kota Makassar seorang kader perempuan nasdem juga terpilih sebagai wakil ketua DPRD Kota Makassar, itu membuktikan bahwa Partai Nasdem Kota Makassar memberikan perempuan posisi posisi strategis dalam politik bukan hanya di legislatif saja tetapi dalam kepengurusan partaipun perempuan diberikan posisi yang strategis. Dan hasil dari keterwakilan perempuan khusus DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu ada sebuah PERDA yang sementara persiapan pengesahan di akhir Januari yaitu PERDA Pengarusutamaan Gender dan satu lagi dari DPRD Kota Makassar ada satu Rancangan Peraturan Daerah mengenai Air Susu Eksklusif yang sementara pembahasan dan salah satu kordinatornya ialah Indira Mulyasari Pramastuti.

B. SARAN

Sebagai penulis yang mencoba berdiri pada posisi akademis dan objektif maka dengan ini penulis mencoba memberikan saran-saran atau masukan kepada jajaran pengurus Partai Nasdem, antara lain

1. Partai Nasdem secara Institusional harus terus mempertahankan komitmennya terhadap persoalan peranan perempuan di politik

2. Terkait peran perempuan dipolitik semoga terus meningkat dan memperkuat posisi perempuan di dalam bidang politik



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-Mumtahanah/60:12. (Semarang : Toha Putra. 2005)
- Adawiah Radiatul,Nurul “*Konflik Internal Partai Nasdem (Studi Tentang DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan)*” *Skripsi* (Makassar:Fak. Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Negeri Hasanuddin Makassar,2013)
- Basti ,Seta”*Pengantar Ilmu Politik*”(Bekasi : Indie book corner 2011)
- Budiardjo ,Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Buku Panduan Partai Nasdem
- Damsar ,*Pengantar Sosiologi Politik* (Padang:Kencana, 2011)
- Hastuti ,Kurniawati, *Belajar dari Kemenangan Perempuan Australia* (Jakarta : Kompas, 2004)
- Khatimah Husnu Saidah , Najmah, 1, *Revisi Politik Perempuan Bercermin Pada Sahabat* (Cet.I, Bogor:CV.Idea Utama 2003)
- Lewis ,Bernard , *Bahasa Politik Islam*, terj. Ihksan Ali Fauzi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Nugroho Riant, *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2011)
- Mernisi ,Fatimah, *Perempuan di antara logika dan kekuasaan*, (Jakarta: Qanita, 2003)
- Mulia Musdah, Siti, *Muslim Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung ; Mizan, 2005)

- Mulia Musdah, Siti dkk, *Keadilan Kesetaraan Gender :Perspektif Islam*, (Jakarta :Lembaga Kajian Agama Dan Jender,2001)
- O .T. Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,1995)
- Pasaribu ,Elvy, *Indonesia Masa Depan Dari Perspektif Perempuan*, (Salatiga : Yayasan Bina Darma, 2000) h. xii
- Parawansa Indar, Khofifah “*Studi Kasus : Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan*” (CS-Indonesia, 2003)
- Prihatinah Lisiani,Tri, *Hukum dan Kajian Jender* (Semarang, : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010)
- Ramdhana, Danu :*Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*” (Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:Surabaya,2013)
- Ridjal ,Fauzi, *Dinamika Gerakan Perempuan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993)
- Rosidawati ,Imas, “*Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Kesiapan Partai Politik & Perempuan Indonesia Di Arena Politik Praktis*”
- Said dan Gatara “*Sosiologi Politik:Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian Bandung* (Bandung: Pustaka setia,2007)
- Sanit ,Arbi. *Perwakilan Politik di Indonesia* (Jakarta:Rajawali,1985. Jakarta)

Susiana , Sali “*Penurunan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2014*”.

(http://berkas.dpr.go.id/pengkajianfiles/info_singkat/info%20singkat-VI-10-II-P3DI-April-2014-11.pdf)

Sridanti Putu, Luh, 2015 “*Peranan Politik Perempuan di Indonesia Peluang dan Hambatan*”, Jurnal STISIP Margarana

Yudistira “*Pelembagaan Partai Nasdem*” Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya

Wibowo Wahyu Seto, Indriawan, “*Di Bidang Politik Perempuan Tetap 'di Bawah' Pria*” dimuat dalam Media Indonesia, Selasa, 15 Oktober 2002

www.cetro.or.id/

<http://www.scribd.com/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan di akses pada 1 November 2015

Pukul 20:00 Wita



L

A

M

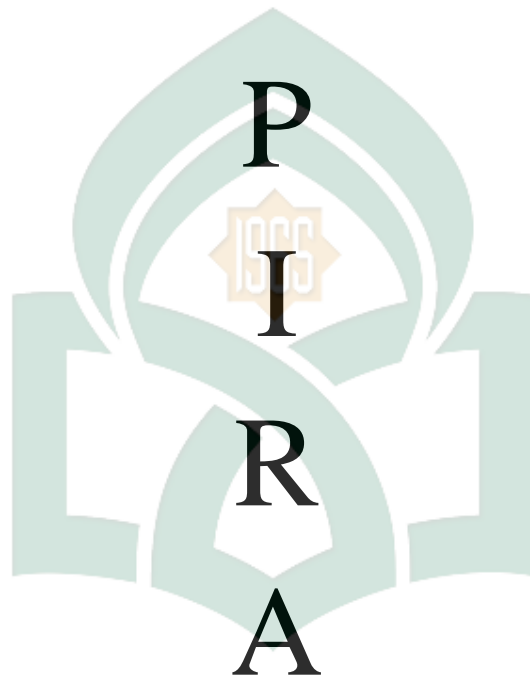
P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Makassar

Provinsi Sulawesi-Selatan Periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

i. DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH

Ketua : Saad Iranda Dollar
Anggota : Irwan Zulkarnain
Anggota : Muhammad Ali Wiryana
Anggota : Asrul Bunyamin Mattaliti
Anggota : Ridwan Saleh
Anggota : Aswan Arsyad
Anggota : Amiruddin
Anggota : Syamsyuriaty

ii. DEWAN PAKAR DAERAH

Ketua : M. Islah Idrus
Anggota : Andi Jerniati Tantu
Anggota : Amri Hadi
Anggota : Subhan Ghani

iii. DEWAN PIMPINAN DAERAH

Ketua : A. Rachmatika Dewi
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilihan Umum : Mario David. PN
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi : Sandy Dwi Nugraha
Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi : Wahyuddin
Wakil Ketua Bidang Pendidikan Politik dan Kebudayaan : Muh. Auda Abbas
Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan : Syamsul Tanca

Wakil Ketua Bid Hukum,Advokasi dan HAM	: Gazali Abd Rahman
Wakil Ketua Bid Otonomi Daerah	: Sudirman
Wakil Ketua Bid Pertanian dan Maritim	: Saddaruddin HM
Wakil Ketua Bid Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat	: Melani Simon
Wakil Ketua Bid Energi,SDA dan Lingkungan Hidup	: Muchtar Djuma
Wakil Ketua Bid Agama dan Masyarakat Adat	: Mustafa Irate
Wakil Ketua Bid Hubungan Antar Daerah	: Abdul Musa Caezar
Wakil Ketua Bid Ekonomi	: Azikin Sugiarto
Wakil Ketua Bid Kesehatan, Perempuan dan Anak	: Indira Mulyasari P
Wakil Ketua Bid Industri, Perdagangan dan Tenaga Kerja	:Arman Patamaraendre
Wakil Ketua Bid Olahraga, Pemuda dan Mahasiswa	: Arianto Burhan
Sekretaris	:Wachyudi Muchsin
Wakil Sekretaris Bid Kepengurusan, Keanggotaan dan Kaderisasi	:Dino Arjuna
Wakil Sekretaris Bid Internal dan Kesekretariatan	: Nur Aini Handaling
Wakil Sekretaris Bid Renlitbang	: Ari Ashari Ilham
Wakil Sekretaris Bid Eksternal	:Bachtiar Mappakaya
Bendahara	: M.Adil Dahlan
Wakil Bendahara Bid Penggalangan Dana	: Kamaruddin Olle
Wakil Bendahara Bid Pengelolaan Asset	: Ulfah

Divisi – Divisi

1. Divisi Kepengurusan,Keanggotaan dan Kaderisasi

Ketua : Chaeruddin Rio

Wakil : Lukas Palengka

Sekretaris : Hamzi Asis

2. Divisi Media dan Komunikasi Politik

Ketua : Puspito Hargono

Wakil : A. Miranti Paturusi

Sekretaris : Fauziah Hamzah

3. Divisi Pendidikan Politik dan Kebudayaan

Ketua : Abd Azis Saputra

Wakil : Amalita Soraya Anwar Fattah

Sekretaris : Kukuh Lestrariyo

4. Divisi Politik dan Pemerintah

Ketua : Irwan Jafar

Wakil : Randy Maulana KS Mamma

Sekretaris : Zulfiadi

5. Divisi Hukum, Advokasi dan HAM

Ketua : Caesar Aswar Abbas

Wakil : Hamzah

Sekretaris : Abdi Segara

6. Divisi Otonomi Daerah

Ketua : Alines Pagiling

Wakil : Achmad R

Sekretaris : Roni Agus

7. Divisi Pertanian dan Maritim

Ketua : Fahmy Syaban

Wakil : Irnawati Usman

Sekretaris : Nurzaenab

8. Divisi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat

Ketua : Desi Nita Sari

Wakil : Farah Rachman

Sekretaris : Rahmat Nuju

9. Divisi Energi SDA dan Lingkungan Hidup

Ketua : Abd Razak Nurdin

Wakil : Geby Indriani Bahasoan

Sekretaris : Ansharia

10. Divisi Agama dan Masyarakat Adat

Ketua : Bahariah

Wakil : A.Ari Sutra

Sekretaris : Budiyanto Yopeace

11. Divisi Hubungan Antar Daerah

Ketua : Ivan Harijuni Paembonan

Wakil : Syamsuddin Mappa

Sekretaris : Andi Nurhani Nurdin

12. Divisi Ekonomi

Ketua : Hesti Rusli

Wakil : Megawati Laenggeng

Sekretaris : Sherly

13. Divisi Kesehatan, Perempuan dan Anak

Ketua : Rahmaniar

Wakil :Asma Arief

Sekretaris : Zulfikri K Novriansyah

14. Divisi Industri, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Ketua :Agus Salim

Wakil : Sri Hartini Mandji

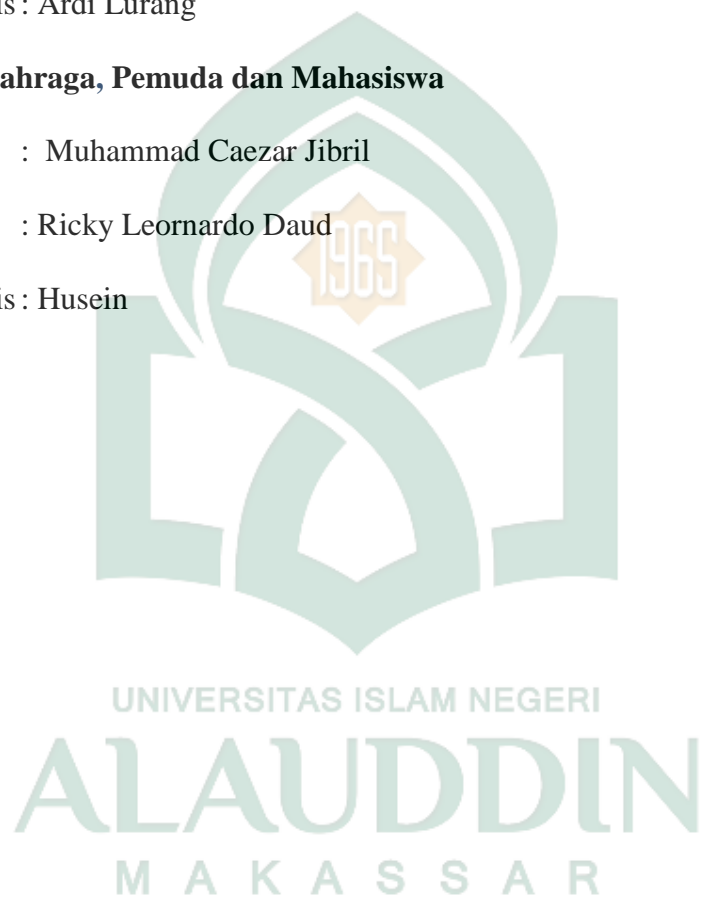
Sekretaris : Ardi Lurang

15. Divisi Olahraga, Pemuda dan Mahasiswa

Ketua : Muhammad Caesar Jibril

Wakil : Ricky Leornado Daud

Sekretaris : Husein



Dokumentasi wawancara

Wawancara dengan Indira Mulyasari Pramastuti sebagai Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Kamis 14 Januari 2016 Pukul 11:00 Wita



Wawancara dengan Andi Nurhani Nurdin Ketua DPC Ujung Pandang ,
Jumat 11 Desember 2015 pukul 10:00 Wita



Wawancara dengan Mario David PN sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenang Pemilihan Umum sekaligus sebagai Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Makassar, Selasa 21 Desember 2015 Pukul 15:00 Wita



Wawancara dengan Rachmatika Dewi sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Makassar sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa 7 Desember 2015 Pukul 15:00 Wita



Wawancara dengan Anggriani Alamsyah sebagai Akademisi Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Selasa 16 Februari 2016 Pukul
15:24 Wita



Riwayat Hidup Penulis



Sri Sumarni Sjahril lahir di Ujungpandang 09 Maret 1995, anak pertama dari pasangan Wali Fendy Sjahril dan Salma. Penulis memulai pendidikan pada TK. Kemala Bhayangkari. Kemudian Penulis melanjutkan lagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Penulis bersekolah di SDN No 194 Leppang pada tahun 2000-2001 kemudian pindah ke SD Inpres Garessi pada tahun 2001-2003 dan SD Tete Batu 1 2003-2006 , SMP di SMP Negeri 1 Pallangga dan SMA Negeri 01 Pallangga. Selain bersekolah penulis juga aktif dibidang beladiri yaitu karate tergabung diperguruan Bandung Karate Club dan masih aktif sampe sekarang. Setelah itu, penulis melanjutkan lagi kenjenjang yang lebih tinggi yaitu masuk keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan jurusan Ilmu Politik dan juga menjadi pengurus Himapol pada jurusan Ilmu Politik pada tahun 2014 dan Amip (Asosiasi Mahasiswi Ilmu Politik pada tahun 2013. Selain berkuliah penulis juga aktif dikomunitas Sobat Budaya Makassar sejak tahun 2014 hingga sekarang dan sekarang penulis memiliki jabatan sebagai ketua komunitas Sobat Budaya Makassar